

**LAPORAN AKHIR
SKEMA PENELITIAN UNGGULAN
TAHUN 2022**



JUDUL PENELITIAN

**KONFLIK DALAM PEMEKARAN KABUPATEN SULAWESI TENGAH
(Studi Kasus di Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong)**

Ketua/NIDN : Haliadi, S.S., M.Hum., Ph.D/ 0011107103

Anggota/NIDN : Dr. Lukman Nadjamuddin, M.Hum/ 0021066606

Anggota/NIDN : Windayanti, S.Pd., M.Pd/ 0027109102

Dibiayai Oleh :

**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BLU
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Universitas Tadulako
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Tadulako
Nomor : 3654/UN28/KU/2022 tanggal 11 April 2022**

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Judul	: Konflik Dalam Pemekaran di Kabupaten Sulawesi Tengah (Studi Kasus di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong)
2. Kode / Nama Rumpun	: Pendidikan Sejarah
3. Ketua Tim	
a. Nama	: Dr. Haliadi, S.S., M.Hum.
b. NIP/NIDN	: 197110112002121001 / 0011107103
c. Pangkat/Golongan	: Penata / III
d. Jabatan Fungsionalitas	: Lektor
e. Fakultas / Institusi	: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
f. Jurusan	: Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
g. Program Studi	: Pendidikan Sejarah
h. Alamat	: Palu
i. Telpn	: 08
j. Email	: haliadisadi@yahoo.com
4. Jumlah Anggota dosen	: (2)
	- 1. Dr. Lukman, M.Hum
	- 2. WINDAYANTI, S.Pd., M.Pd
5. Jumlah Mahasiswa Yang Terlibat	: (1)
	- 1. Nurhalisa (A31117116)
6. Luaran	: Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA; KI Hak Cipta;
7. Waktu proposal	: 0 Tahun/ 8 Bulan
8. Skema proposal	: Penelitian Unggulan
9. Jumlah Usulan Biaya	: Rp.50.000.000
10. Sumber Dana	: DIPA Fakultas
11. Dana Disetujui	: Rp.23.000.000

Mengetahui,
Ketua LPPM UNTAD,



Dr. Ir. Muh. Rusydi H. M.Si
NIP.196311131992031001

Palu, 29 Maret 2022
Ketua Tim,



Dr. Haliadi, S.S., M.Hum.
NIDN.0011107103



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Tinjauan Pustaka	8
Bab III Metodologi Penelitian	18
Bab IV Hasil dan Pembahasan	21
4.1 Hasil Penelitian	21
4.2 Pembahasan Penelitian	27
Bab V Kesimpulan dan Saran	43
Daftar Pustaka	47

RINGKASAN

Kajian ini akan membahas tentang pemekaran di Sulawesi Tengah yang disertai dengan konflik horizontal maupun konflik vertikal dalam sejarah politik kontemporer di Sulawesi Tengah. Perkembangan sejarah politik lokal di Sulawesi Tengah dimulai sejak adanya reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999. Pemekaran Kabupaten yang paling awal di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali dan Kabupaten Buol menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, sedangkan Kabupaten Parigi Moutong dimekarkan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002. Kedua pemekaran ini disertai dengan adanya konflik komunal dan kekerasan kolektif tentang isu ibu kota kabupaten dan percepatan pemekaran. Kajian seperti ini sudah dimulai oleh Henk Schulte Noordholt yang menulis sebuah buku yang berjudul “Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia” yang di dalamnya memuat wacana dari konflik hingga kekerasan. Kajian yang melihat awal pemekaran di Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh Haliadi dan Leo Agustino yang berjudul: “Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah,” di Jurnal Cosmogov pada tahun 2015. Penelitian ini menjadi dasar kajian untuk melihat pemekaran di tingkat Kabupaten di Sulawesi Tengah.

Persoalan penelitian ini difokuskan pada pertanyaan 1. Bagaimana proses penuntutan pemekaran sebagai tuntutan otonomi daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong?, 2. Bagaimana perbandingan konflik horizontal dan vertikal dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong?, dan 3. Bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh lokal dalam pemekaran dan penyelesaian konflik di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong? Tujuan penelitian umum penelitian ini adalah menjelaskan dan menggambarkan Konflik dalam Pemekaran Kabupaten di Sulawesi Tengah. Tujuan khusus penelitian ini menguraikan proses penuntutan pemekaran sebagai tuntutan otonomi daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong, 2. Menjelaskan perbandingan konflik horizontal dan vertikal dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong, dan 3. Menganalisis keterlibatan tokoh-tokoh lokal dalam pemekaran dan penyelesaian konflik di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong.

Uraian penjelasan hasil penelitian ini akan menggunakan pendekatan multidisiplin yakni sosial, budaya dan politik. Teori yang digunakan dalam menganalisis hasil penelitian ini adalah teori desentralisasi, otonomi daerah dan teori konflik. Tahapan penelitian menggunakan metodologi sejarah dengan empat tahapan penting, yakni: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menemukan bahwa, konflik yang terjadi di kabupaten banggai Kepulauan adalah konflik penempatan Ibu Kota yang harusnya di Kota Banggai kemudian dipindahkan ke Salakan Pulau Peling, sementara di Kabupaten Parigi Moutong adalah konflik struktural di DPRD Kabupaten Donggala dengan Kelompok Gempar Parigi Moutong.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pemekaran, dan Konflik.

BAB I

PENDAHULUAN

Kajian tentang pemekaran di Sulawesi Tengah belum banyak menjelaskan tentang konflik horizontal maupun konflik vertikal dalam sejarah politik kontemporer di Sulawesi Tengah. Perkembangan sejarah politik lokal di Sulawesi Tengah dimulai sejak adanya reformasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 1999. Inti dari reformasi di Indonesia adalah perjuangan desentralisasi dalam sistem sentralisasi selama Orde Baru sepanjang 30 tahun lebih. Upaya desentralisasi di Sulawesi Tengah mulai dilakukan pasca 1999 yang ditandai dengan pemekaran wilayah. Pemekaran Kabupaten yang paling awal di Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan, Morowali dan Kabupaten Buol menurut Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, sedangkan kabupaten Parigi Moutong dimekarkan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002.¹ Pemekaran yang terjadi pada tahun 1999 dan 2002 tidak berjalan mulus tetapi ada saja hambatannya sehingga masyarakat melakukan gerakan penuntutan sebelum munculnya Undang-Undang tersebut. Gerakan ini menjadi penting karena hal itulah yang menjadi pemicu pemekaran dan terkadang terjadi konflik sosial secara massif sehingga menjadi episode cerita yang menarik dalam historiografi Sulawesi Tengah. Merebaknya berbagai macam bentuk kekerasan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini yang dibuka tabirnya oleh Media Massa menyadarkan kita semua bahwa rupanya dalam proses perjalanan sejarah kita ada sisi penting yang bernama kekerasan. Inilah yang

¹ Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45394/uu-no-51-tahun-1999#:~:text=UU%20No.%2051%20Tahun%201999,Banggai%20Kepulauan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44437/uu-no-10-tahun-2002#:~:text=UU%20No.%2010%20Tahun%202002,Sulawesi%20Tengah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

dimaksudkan dengan sebutan “historiografi kekerasan.” Henk Schulte Noordholt yang menulis sebuah buku yang berjudul “Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia” yang di dalamnya memuat wacana dari konflik hingga kekerasan. Peristiwa tersebut akan lebih menarik kalau dituangkan dalam sebuah tulisan sejarah mulai dari latar belakang peristiwa termasuk proses perjuangan pemekaran yang penuh konflik hingga dampak munculnya Undang-Undang sebagai dasar pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOM) di Provinsi Sulawesi Tengah. Peristiwa ini akan lebih tajam dijelaskan dengan menggunakan analisis teori otonomi daerah di awal Reformasi di Indonesia.

Teori yang relevan dengan kajian tentang konflik dalam pemekaran di Provinsi Sulawesi Tengah adalah teori otonomi daerah. Menurut Turner dan Hulme yang dikutip oleh Ratnawati dalam Karim (2003: 77) yang berkuasa adalah masyarakat di daerah. Turner dan Hulme (1997:154) menyatakan: “*When authority is delegated by devolution, a typical accountability mechanism is local elections in which the local population is ultimately the ‘higher authority.’*” Dalam hal ini, otonomi daerah diartikan Ratnawati (2003) bahwa otonomi daerah adalah otonominya masyarakat; bukan otonominya pemerintah daerah atau otonominya elit-elit lokal saja.”² Menurut penjelasan tersebut dapat ditangkap bahwa teori otonomi daerah berinti pada variabel keterlibatan masyarakat sipil dalam kebijakan politik lokal. Teori ini akan menjadi penting dalam pembahasan tentang otonomi daerah di Sulawesi Tengah karena akan melihat keterlibatan masyarakat dalam proses pengajuan pemekaran di era reformasi. Hal ini sesuai dengan perubahan sejarah pemerintahan lokal di Indonesia yakni perubahan dari sentralisasi ke arah desentralisasi. Perubahan politik nasional tersebut akan lebih bagus ketika kita menjelaskan perubahan politik lokal terutama pemekaran kabupaten di Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah.

² Karim, Abdul Gaffar (ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).

Kajian yang membahas tentang konflik dalam pemekaran di Indonesia telah dilakukan oleh ilmuwan politik. Salah satu kajian menarik tentang konflik dalam pemekaran telah dilakukan oleh Neneng Sobibatu Rohmah yang berjudul :”Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten” yang dimuat dalam Jurnal CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan.³ Salah satu kelebihan artikel ini adalah mampu menampilkan pemekaran di Provinsi Banten.

Kasus penembakan Aparat Kepolisian terhadap kelompok yang mempertahankan ibukota Banggai Kepulauan dan Penutupan Kantor pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong oleh kelompok demonstrasi pemekaran Parigi Moutong dari Kabupaten Donggala merupakan kasus penting dalam sejarah pemekaran wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. setelah pemekaran tercapai dengan munculnya UU no. 51 tahun 1999 (pasal 11) ibukota harus dipindahkan dari Kota Banggai ke Kota Salakan. Perpindahan ibukota secara sosio-kultural merubah secara revolusioner (bukan secara evolusi) terutama kejadian 28 Pebruari 2007 dengan empat orang korban masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Berdasarkan beberapa pendekatan, hal itu adalah bukti bahwa Negara ini tidak dapat memanajemeni perubahan konflik komunal menjadi kekerasan kolektif. Kasus Banggai Kepulauan pada tahun bulan 27 Pebruari 2007 adalah bukti bahwa Negara tidak bias menata secara baik kasus-kasus konflik komunal di daerah. Awal mula konflik di Banggai Kepulauan⁴ diawali oleh munculnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999

³ Neneng Sobibatu Rohmah yang berjudul :”Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten,” Jurnal CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4, No.1, April 2018.

⁴ Konflik di wilayah Banggai sesungguhnya bias diperhatikan sejak Perjuangan Laginda melawan Belanda, baca: Juraid dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991); Jar’an Abd. Fatah, Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali, tanpa tempat, penerbit, dan tahun

sebagai regulasi pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pasal 11 dinyatakan bahwa “selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota di Banggai dipindahkan ke Salakan.” Munculnya pasal 11 tersebut menurut “tokoh-tokoh Kota Banggai dianggap sebagai “pasal siluman” yang sengaja dibuat oleh penguasa Banggai yang bukan orang kelahiran Kota Banggai pada waktu itu yang kebetulan mereka memiliki akses ke DPR pusat padahal semua dokumen pengajuan pemekaran tidak ada satu lembarpun yang mendukung pasal tersebut tapi tiba-tiba muncul pasal 11 sebagai pemicu munculnya konflik. Tokoh yang memunculkan pasal tersebut disebutkan dalam catatan kesaksian Iwan Zaman yang langsung menyebutkan nama-nama tokoh kelompok kecil yakni “Trio Malingong bersaudara” seumpama: Irianto Malingong, Suleman Malingong, Israfil Malingong, Harman Pandipa, Darman Pandipa, Zainuddin Soti, Hasgoro Lampajoa, Abdi Sahido, dan beberapa lainnya di antara mereka, sekarang (baca 2007) ini menjadi Elit Politik Lokal di Bangkep mereka menjadi penguasa di lembaga Eksekutif dan Legislatif sebagai BUPATI, Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan DPRD dan Ketua Fraksi Gabungan di DPRD Bangkep.⁵ Kejadian ini sesungguhnya mengulang lagi atau mengorek kesalahan lama pemindahan Ibu Kota Banggai yang dilakukan oleh Belanda sejak tahun 1908 hingga 1938 yang membagi Kerajaan Banggai menjadi dua yakni Banggai Darat dan Banggai Laut dengan menyepelkan satu Banggai sebagai Ibukota. Juga pada masa Jepang, ibukota

terbit; Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Ria Mardin, “Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali, “ dalam: Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Pahlawan Rambe, Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999), Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003. Reinhard Nainggolan, “Demokrasi pada Kearifan Lokal,” Kompas, Senin 7 Mei 2007; Wilman Darsono, Mengais Rejeki di Ayunan Ombak (Skripsi S1 FKIP Untad 2006).

⁵ Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama “Menjalankan” Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan.

Banggai dipindahkan secara sewenang-wenang ke Luwuk dari Banggai. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1960-an Kabupaten Banggai terbentuk dengan Ibukota di Luwuk dan tetap menyepelkan posisi Banggai sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Banggai beserta hak-hak adatnya.⁶ Setelah benar-benar otonomi tercipta dan Banggai Kepulauan terbentuk sebagai Kabupaten otonom di era reformasi, ibukotanyapun dialihkan dari Banggai ke Salakan.⁷ Hal inilah yang dimaksudkan oleh Hasdin Mondika sebagai “pilunya tangisan jiwa-jiwa lemah yang hak-haknya dirampas,” maksudnya Negara telah merampas hak-hak masyarakat beserta adat istiadat maupun kebanggaan sejarah Kerajaan Banggai.

Demikian juga dengan kasus pemekaran Kabupaten Parigi Moutong dari Kabupaten Donggala bahwa pada bulan Mei 1999 ada banyak gelombang arus masyarakat melaksanakan audance dengan Bupati Donggala, DPRD Donggala dan Gubernur Sulawesi Tengah. Pada Medio Juni 1999 di Kecamatan Parigi terbentuk organisasi GEMPPAR dan mengadakan aksi penutupan Kantor-kantor Dinas Instansi dan Jawatan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, hal ini dilakukan agar secepatnya perhatian Pemerintah terkonsentrasi pada pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.⁸

Konflik antara aparat dengan kelompok masyarakat biasanya yang menjadi pemicu dan pelaku utama adalah tokoh yang berpengaruh sehingga teori yang cocok argumentasi kenyataan adalah teori aktor. Teori ini akan lebih mudah menjelaskan

⁶ Haliadi, Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007.

⁷ Haliadi, Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama,” Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.

⁸ Haliadi, dkk., Sejarah Kabupaten Parigi Moutong (Yogyakarta, Ombak, 2012).

tokoh yang mempengaruhi kelompok yang berkonflik. Teori aktor politik dinyakan bahwa “Aktor politik menjadi bagian penting dari proses perubahan-perubahan yang diinginkan, karena mereka adalah sebagian kecil orang yang mempunyai kualitas yang berhasil meraih jabatan tinggi dalam tatanan masyarakat, sehingga kekuasaan secara sosial dan politik dapat terpenuhi dengan kehadiran mereka.”⁹ Kehadiran tokoh politik dalam proses pemekaran wilayah menjadi penting dalam perubahan politik lokal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan anggapan Leo Agustino dalam artikelnya yang menyatakan bahwa:

“Perubahan haluan dari ‘politik lama’ yang tersentralisasi dan terkontrol kepada ‘politik baru’ yang ter-desentralisasi dan egaliter membawa angin segar bagi politik lokal di Indonesia, setidaknya pada tahun-tahun pertama reformasi. Namun setelah melewati ‘bulan madu’ reformasi yang sebentar, beberapa sarjana segera menangkap pertumbuhan pesat para broker politik dan local strongmen di level lokal, yang mulai mengambil alih kekosongan maupun memperkuat akses kontrolnya terhadap politik.”¹⁰

Broker politik dan lokal strongmen menjadi fenomena baru dalam pemekaran di tingkat lokal di Indonesia termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kajian yang melihat pemekaran di Sulawesi Tengah telah dilakukan oleh Haliadi dan Leo Agustino yang berjudul: “Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah,” di Jurnal Cosmogov pada tahun 2015.¹¹

⁹ Brian Mc Nair. 2003. *An Introduction To Political Communication*. London and New York: Routledge, dalam: Nurlaina, *Motif Aktor Lokal Dalam Kuota Pencalonan 120 Porsen Partai Politik Lokal Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Aceh*, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31824/187054017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹⁰ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik,” *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010, hal. 5-30.

Penelitian ini menjadi dasar kajian untuk melihat pemekaran di tingkat Kabupaten. Artikel Haliadi dan Leo Agustino telah menjelaskan secara lugas pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1964 dari Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tulisan itu belum menjelaskan tentang pemekaran di masa Reformasi yang dimulai tahun 1999. Berdasarkan beberapa uraian di atas, penelitian menganggap bahwa penelitian tentang pemekaran di Sulawesi tengah masih relevan dilakukan. Laporan ini memilih berjudul: “KONFLIK DALAM PEMEKARAN KABUPATEN DI SULAWESI TENGAH (Studi Kasus di Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong).”

¹¹ Loe Agustino dan Haliadi yang berjudul: “Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah,” Jurnal Cosmogo, Vol. 1, No.2 (2015), hal. 345-376.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Merebaknya berbagai macam bentuk kekerasan dalam masyarakat Indonesia dewasa ini yang dibuka tabirnya oleh Media Massa menyadarkan kita semua bahwa rupanya dalam proses perjalanan sejarah kita ada sisi penting yang bernama kekerasan. Inilah yang dimaksudkan dengan sebutan “historiografi kekerasan.” Henk Schulte Noordholt yang menulis sebuah buku yang berjudul “Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia” yang di dalamnya memuat wacana dari konflik hingga kekerasan.¹² Akibat perkembangan Media Massa menyadarkan kita akan adanya konflik dan kekerasan yang kita amati hampir setiap detik, menit, jam, tanggal dan hari, minggu, bulan serta tahun bahkan abad. Padahal, kalau kita serius memperhatikan proses perjalanan panjang sejarah kita, disana terpampang pelajaran-pelajaran yang amat berarti mengenai proses perkembangan genealogi kekerasan masyarakat baik secara budaya, ekonomi, sosial, dan politik.

Schulte Noordholt mensinyalir bahwa ada semacam kontinuitas kekerasan dalam perspektif sejarah: masa kerajaan, masa kolonial, masa post-kolonial. Pada masa kerajaan dulu, kalau kita mau sadar sepenuhnya bahwa di Sulawesi Tengah ini terdapat akar konflik komunal yang diakhiri dengan proses kekerasan yakni pada masa “*tomalanggai*” (orang kuat) dan masa “*mengayau*” (pencarian kepala) atau perang antara suku. Hal ini dapat dilihat dalam perspektif kultural sebagai akar kekerasan pada masa lalu. Pada masa kolonial lebih kepada perspektif politik kami sepakat dengan Henk Schulte Noordholt bahwa kekerasan di Nusantara atau biasa dikenal Hindia Belanda terjadi dalam dua gelombang, yakni: gelombang kekerasan

¹² Henk Schulte Noordholt, *Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

ketika VOC sedang melebarkan sayap monopoli dagangnya, gelombang kekerasan kedua terjadi di penghujung abad ke-19 yakni ketika Negara imperialisme modern sedang hendak ditegakkan. Pada masa post kolonial lebih kearah perspektif ekonomi dan sosial.

Secara Kultural, kekerasan sebenarnya berakar dalam tradisi pra-kerajaan-kerajaan dulu dan juga dalam masyarakat Indonesia sendiri. Masalahnya adalah didalam cara bagaimana kekerasan itu dipraktikkan dan untuk tujuan apa. Kekerasan yang terjadi dikalangan para pemimpin komunitas atau di Poso disebut “Kabosenya” dan di Kaili disebut ‘Magau” di Mori disebut “Mokole” adalah dengan tujuan memperebutkan sumber-sumber yang jarang termasuk simbol-simbol kekuasaan. Perlu ditegaskan bahwa aksi-aksi kekerasan di masa kerajaan dulu seperti peperangan, perkelahian, dan aksi-aksi perampokan antardesa atau kampong masih ditemukan. Hal itu dapat dilihat dalam proses pengayauan antara kelompok genealogis di suatu pemukiman yang menyerang pemukiman lainnya. Kejadian ini mengakibatkan korban bergelimpangan termasuk anak-anak dan perempuan-perempuan sebagai akibat peperangan antarkelompok genealogis. Dalam berbagai kasus kekerasan memang ada kecenderungan untuk mencari sebab kekerasan dalam kebudayaan setempat seperti kasus kekerasan di Kalimantan antara orang Dayak sebagai kaum “*pengayau*” dengan orang Madura sebagai orang-orang “*Carok*.”

Secara politik, kekerasan adalah suatu fenomena yang sangat umum yang hanya dapat dipahami melalui perbandingan dengan situasi-situasi tertentu atau kejadian particular atau unik dalam historis. Dalam tulisan Anton Blok yang berjudul “*Wittgenstein en Elias: Een Methodische Richtlijn voor de Antropologie*,” dinyatakan bahwa “penggunaan perbandingan dalam konteks persamaan-persamaan family di

dalam masa fenomena tertentu dapat mengungkapkan persamaan dan perbedaan.¹³ Sejalan dengan jalur pemikiran itu dapat menjadi fasilitator untuk memahami artian diakronik, untuk menyelidiki kekerasan di Indonesia dan menempatkannya dalam kerangka genealogi kekerasan itu. Sesuai parameter sosiologi dan antropologi dalam historiografi Indonesia dapat dinyatakan bahwa para actor kekerasan sendiripun mendasarkan pendekatan-pendekatan mereka pada pengalaman dan contoh-contoh yang mereka peroleh dari generasi-generasi sebelumnya. Inilah yang disebut Henk dalam historiografi Indonesia sebagai penciptaan “**rezim ketakutan**” sebagai akibat dari bentuk aksi-aksi kekerasan fisik kolonial kemudian diwariskan pada generasi-generasi Indonesia berikutnya, terutama pada Indonesia masa transisi.

Pada masa kolonial Belanda (baca: Hindia Belanda) sejumlah kekerasan “Negara” terhadap kelompok masyarakat dapat dilihat dari benturan penguasa Kolonial dengan tokoh-tokoh masyarakat di Sulawesi Tengah. Kekerasan Negara kolonial kepada kelompok masyarakat dapat dilihat di Mori “Perlawanan Owolu Marunduh,” di Napu “Perlawanan Umana Soli,” di Tojo “Perlawanan Kolombo,” di Kulawi “Perlawanan Jilloy,” di Moutong “Perlawanan Tombolotutu,” dan di Tolitoli “Perlawanan Haji Hayun.” Terkhusus Perlawanan Haji Hayun di Salumpaga Tolitoli terhadap Kolonial Belanda karena disertasi kami mengindikasikan adanya kekerasan terhadap masyarakat dan juga sebaliknya adanya kekerasan terhadap pejabat kolonial ditandai dengan meninggalnya De Cat Angelino. Belanda dengan segala kekuasaannya menekan dan membunuh kelompok Imam Haji Hayun pada bulan Suci Ramadhan, padahal kelompok Imam Haji Hayyun memiliki ideologi Islam dan sedang giat-giatnya pengembangan gerakan PSII di Tolitoli. Akhirnya menimbulkan benturan dan kekerasan antara orang Tolitoli dengan Belanda yang amat berarti

¹³ Anton Blok, *Wittgenstein en Elias: Een Methodische Richtlijn voor de Antropologie* (Athenaeum: Polak & Van Gennep. 1976).

dalam historiografi Indonesia terkhusus dalam historiografi kekerasan di Sulawesi Tengah.¹⁴

Secara sosio-ekonomi, kekerasan yang terlihat dalam sejarah kontemporer Indonesia dewasa ini termasuk Sulawesi Tengah dapat dilansir oleh Pusat Penelitian Sejarah Universitas Tadulako yang yang baru kami bentuk mewadahi kami dalam menelusuri akar-akar kekerasan dapat terjadi dalam dua diktum utama, yakni: **Pertama**, kami berpendapat bahwa untuk memahami konflik yang terjadi, berbagai kelompok masyarakat harus diamati perubahannya dalam waktu yang panjang. Dalam arti tertentu kami selalu mengembangkan penelitian sejarah (*historical approach*). Namun demikian paparan ini bukanlah dalam artian penelitian mengenai kronologi peristiwa atau kejadian kekerasan. Kami melihat dan memandang sesuatu dengan pendekatan jangka panjang yakni pendekatan yang melihat proses perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Perubahan ini bukan hanya dalam arti ekonomi atau sosial, tetapi juga perubahan dalam identitas kelompok. Hal ini sangat penting karena seperti yang telah diamati oleh peneliti lain, identitas kelompok inilah yang digunakan untuk memobilisasi massa. Terbentuknya identitas yang menandai adanya “**kami**” dan “**anda**,” “**kita**” dan “**mereka**” membutuhkan waktu yang panjang dan tergantung kepada proses perubahan sosial, ekonomi dan politik yang ada. Lebih rumit lagi, keanggotaan dalam kelompok dengan identitas itupun bergeser-geser sesuai kondisinya. Seseorang yang hari ini adalah bagian dari “**kita**” bisa jadi menjadi “**mereka**” keesokan harinya. Hanya pendekatan kesejarahanlah yang dapat membaca pergeseran-pergeseran semacam ini.

Kedua, sudah jelas bahwa pendekatan struktural harus dilakukan secara bersama-sama dengan pendekatan kesejarahan. Cepatnya pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh berbagai daerah di Indonesia sebelum tahun 1997 tidak hanya

¹⁴ Haliadi dan Ismail, Sejarah Sosial Sulawesi Tengah (Palu: Hoga, 2019).

merubah struktur ekonomi nasional tapi juga struktur ekonomi daerah tersebut. Terus menurunnya peranan sektor pertanian dalam ekonomi berarti semakin banyak orang yang meninggalkan ataupun terpaksa meninggalkan sektor tersebut. Sebagian dari mereka memasuki sektor manufaktur, sebagian besar lainnya memasuki sektor jasa yang terus membesar di daerah perkotaan. Semua perubahan ini dimungkinkan oleh adanya struktur sosial yang kondusif terhadap berbagai perubahan, dan sebaliknya perubahan yang ada pada akhirnya akan merubah struktur sosial di masyarakat. Negara dan sistem pemerintahan yang sangat kuat dan sentralistis yang diciptakan oleh rejim Orde Baru baik di Jakarta maupun di ibukota-ibukota propinsi, ingin mengelola perubahan ini hingga tingkat yang paling detil. Dalam proses penciptaan negara-kuat (*strong state*), rejim Orde Baru harus menundukkan, mengkooptasi ataupun menyingkirkan kekuatan-kekuatan lokal. Dalam jangka panjang bangkitnya negara-kuat secara dramatis merubah struktur politik lokal. Perubahan-perubahan struktural ini berbeda-beda untuk tiap daerah, tergantung kondisi spesifik dan pengalaman historisnya. Perubahan-perubahan inilah yang kami amati dalam menggeluti ilmu sejarah dan antropologi ini. Kami percaya bahwa pemahaman lebih baik akan perubahan struktural ini akan membantu mencari jalan untuk pemecahan jangka panjang untuk masalah konflik dan kekerasan di SulawesiTengah.

Meskipun banyak konflik komunal dan kekerasan meletus di masa lima tahun terakhir, namun kondisi struktural yang mendorong pecahnya konflik telah mulai terbentuk sejak lama. Secara politis, tahun 1960-an adalah saat penting dalam riwayat republik ini. Ingat, kasus Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) yang melawan Permesta dalam bentuk kekerasan menjadi salah satu sebab Poso selalu dihiasi oleh kekerasan akhir-akhir ini. Rejim Orde Baru berakar dari periode ini. Meskipun demikian ekspansi ekonomi yang diterapkan banyak yang baru mulai dirasakan di daerah di tahun 1970-an atau bahkan awal 1980-an. Tahun 1980-an ditandai oleh lahirnya konglomerat-konglomerat yang berbasis di Jakarta namun menguasai sumberdaya alam dan ekonomi yang luas di daerah. Namun perlu diingat bahwa

meskipun ekspansi ekonomi secara besar-besaran baru terjadi di tahun 1980-an, banyak elemennya sudah mulai ditanam di tahun 1930-an. Industri karet, kayu, batubara atau minyak termasuk kelapa dan kayu hitam di Sulawesi Tengah dimulai di awal abad ke-20. Demikian pula pergerakan penduduk ke lain daerah nampaknya mulai meningkat di tahun 1930-an.

Perspektif Sosio-Budaya sebagai produk sejarah akan menjadi sebuah pendekatan yang memadai dalam memahami perubahan akan kekerasan masyarakat. Berbagai konflik serta kerusuhan massal akan tepat jika ditempatkan pada konteks situasi dan kondisi sosio-kultural masyarakat tempat terjadinya kerusuhan. Kondisi sosio-kultural dapat dibedakan secara antropologis menjadi kondisi primer (kondisi langsung) dan kondisi sekunder (kondisi tidak langsung). Kondisi Primer mengacu pada gejala-gejala sosial budaya selain gejala konflik dan kerusuhan massal dalam masyarakat yang menjadi salah satu pendukung penting dari terjadinya gejala ini. Sedangkan Kondisi sekunder mengacu pada gejala-gejala sosial-budaya yang tidak sangat besar pengaruh atau sumbangannya dalam proses terjadinya konflik dan kerusuhan massal. Akhirnya, kami sependapat dengan Ted Robert Gur dalam *“Why Men Rebel”* yang menyebut tentang *“relative deprivation”* atau “jarak antara harapan dan kemampuan” sebagai penyebab utama kekerasan.¹⁵ Dengan inilah Kuntowijoyo menyatakan bahwa sebab, alasan, kondisi, dan motifasi kerusuhan dan kekerasan bukan mono causal atau satu sebab saja, tetapi plurikausal atau bersebab banyak yang harus diteliti secara serius dan cermat. Inilah fungsi Ilmu pengetahuan sosial sebagai suatu kekuatan. *Clowledge is Power* (Michel Foucault).

B. Teori Desentralisasi

Pada dasarnya desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Menurut

¹⁵Ted Robert Gur, *Why Men Rebel* (Princeton University Press, 1970; revised edition Paradigm Publishers, 2010)

Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.¹⁶ Pada kalangan ahli hukum Indonesia, desentralisasi didefinisikan secara beragam. Menurut RDH Koesoemaharmadja, secara harfiah desentralisasi berasal dari dua penggalan kata bahasa Latin yakni : *de* = berarti lepas, *centrum* = berarti pusat. makna harfiah dari desentralisasi adalah melepaskan diri dari pusat. dalam makna ketatanegaraan, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah- daerah. Desentralisasi merupakan *staatkundige decentralisatie* (desentralisasi ketatanegaraan), atau lebih sering disebut dengan desentralisasi politik, bukan *ambtelijke decentralisatie*, seperti halnya dengan dekonsentrasi.¹⁷

C. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi pemerintahan desentralisasi, istilah otonomi berasal dari penggalan dua kata bahasa Yunani, yakni autos yang berarti sendiri dan monos yang berarti undang- undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*), namun dalam perkembangannya, konsepsi otonomi daerah selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda-perda), juga utamanya mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van Der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan

¹⁶ Henry Muddick, 1966, ***Democracy, Decentralization and Development, Reprinted London, Asia Publishing House***, hlm 23. Diterjemahkan bebas dengan judul, ***Desentralisasi dalam Praktek***, Cetakan I, Pustaka Kendi, Yogyakarta, 2004, hlm, 34.

¹⁷ Koesoemahatmadja, 1979, ***Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia***, Binacipta, Bandung. Dikutip oleh M. Laica Marzuki dalam ***Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm, 151

rumah tangga sendiri).¹⁸ Syauckani dkk, menyatakan bahwa visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. Dibiidang politik, karena otonomi buah dari desentralisasi dan dekonsentrasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. Dalam konteks ini, otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun berbagai infra struktur yang menunjang perputaran ekonomi didaerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa masyarakat ke tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu. Dibiidang sosial dan budaya. Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial, dan pada saat yang sama, memelihara nilai-nilai lokal yang dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon dinamika kehidupan disekitarnya dengan kearifan lokal.¹⁹

D. Teori Konflik

Menurut Hedi Shri Ahimsa Putra bahwa konflik social dapat dilihat dari kondisi primer dan kondisi sekunder masyarakat yang berkonflik. Kondisi sosio-kultural dapat dibedakan secara antropologis menjadi kondisi primer (kondisi

¹⁸ M. Laica Marzuki, 2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm, 161.

¹⁹ Syauckani, HR dkk,2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta, hlm. 173.

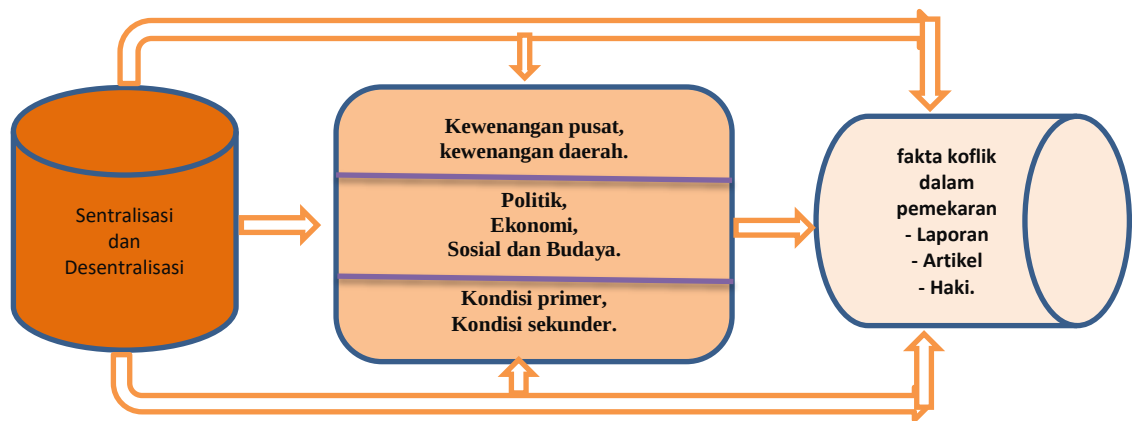
langsung) dan kondisi sekunder (kondisi tidak langsung).²⁰ Kondisi Primer mengacu pada gejala-gejala sosial budaya selain gejala konflik dan kerusuhan massal dalam masyarakat yang menjadi salah satu pendukung penting dari terjadinya gejala ini. Sedangkan Kondisi sekunder mengacu pada gejala-gejala sosial-budaya yang tidak sangat besar pengaruh atau sumbangannya dalam proses terjadinya konflik dan kerusuhan massal. Secara antropologis, kondisi primer dari kondisi sosial budaya masyarakat antara lain: *Pertama*, Terdesaknya akses kelompok tertentu ke kekuasaan dan sumber daya. *Kedua*, Keterdesakan terjadi lewat proses yang dianggap tidak adil dan curang. *Ketiga*, Penguasa baru atas akses dan sumber daya adalah para pendatang. *Keempat*, Para pendatang berbeda suku, agama, atau rasnya. *Kelima*, Etnosentrisme dan eksklusivisme. Sedangkan, kondisi sekunder dari kondisi sosio-kultural masyarakat antara lain: *Pertama*, “Rasa Keadilan” masyarakat setempat yang tidak terpenuhi. *Kedua*, Aparat Pemerintah yang tidak peka terhadap kondisi genting masyarakat. *Ketiga*, Aparat pemerintah yang memihak/mengutamakan salah satu kelompok. *Keempat*, Kesadaran kesatuan bangsa yang masih lemah. *Kelima*, pengetahuan budaya lokal yang masih sangat kurang.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilandasi oleh input bahwa perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi membuka peluang adanya pemekaran baru. Kemudian, perjuangan otonomi daerah di tingkat lokal Provinsi selalu saja disertai dengan adanya konflik horizontal maupun konflik vertikal. Pada proses penelitian ini menggunakan variabel teori desentralisasi dengan variabel kewenangan daerah atas kewenangan pusat. Demikian juga teori otonomi daerah memilih variabel Politik, Ekonomi, serta Sosial dan Budaya. Akhirnya, teori konflik dilihat dari variabel

²⁰ Mengadopsi dari Guru saya Bapak Dr. Hedy shri Ahimsa Putra dalam makalahnya yang berjudul: “Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Adakah Hubungannya, disampaikan pada Dies Natalis ke-55 Fakultas sastra UGM tanggal 24 Maret 2001, hlm. 11.

Kondisi sosio-kultural kondisi primer (kondisi langsung) dan kondisi sekunder (kondisi tidak langsung). Sementara output penelitian ini secara teoretis menghasilkan adanya fakta koflik dalam pemekaran kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, sementara secara praktis penelitian ini akan menghasilkan laporan penelitian dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terindeks, serta haki artikel. Kerangka pemikiran penelitian ini lebih jelasnya dapat diperhatikan berikut ini:



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Riset ini menggunakan metodologi Sejarah dengan melakukan pengumpulan (heuristik), Kritik Sumber, penggolongan (pengklasifikasian) dan penganalisaan berbagai persoalan kemasyarakatan dalam konflik dan budaya molibu masyarakat Kaili Sulawesi Tengah. Analisis penelitian ini menggunakan pendekatan etnografis. Data ini dikumpulkan melalui berbagai macam cara seperti observasi, wawancara, intisari dokumen, dan sebagainya.

3.1 Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian ini memilih obyek dua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Politik dan Antropologi dengan memilih teori politik tentang teori desentralisasi, teori otonomi daerah dan teori antropologi tentang teori konflik.

3. 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni empat tahapan penelitian: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan historiografi. Tahap Heuristika dilakukan dengan cara: Focus Group Discussion (FGD), interview, dan arsip/dokumen. *Pertama*, Focus Group Discussion (FGD). Tim peneliti akan melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang akan dihadiri oleh para pemangku kepentingan, baik dari perwakilan masyarakat adat, pemerintah lokal, guru-guru, maupun para penggiat budaya di dua Kabupaten (Kabupaten Banggai Kepulauan dan

Kabupaten Parigi Moutong). Kegiatan FGD tersebut bertujuan untuk menjangkit sebanyak mungkin informasi tentang berbagai permasalahan otonomi dan konflik di dua Kabupaten Sulawesi Tengah. Mengacu pada hasil FGD, peneliti akan mengidentifikasi berbagai faktor sebagai permasalahan otonomi daerah dan konflik di Sulawesi Tengah dan mendiskusikan berbagai temuan dan mencari solusi atas berbagai masalah tersebut. *Kedua*, Interview atau wawancara. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan masyarakat yang terpilih dan para pejabat di tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa/kelurahan untuk menjangkit informasi dari tokoh masyarakat dan sejumlah organisasi masyarakat di dua Kabupaten. Masyarakat yang akan diwawancarai tidak hanya berkecimpung dalam prosesi adat istiadat, tetapi juga masyarakat umum yang langsung terlibat dalam persoalan-persoalan berkonflik pemekaran wilayah. *Ketiga*, Arsip atau Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah arsip statis dan arsip dinamis tentang pemekaran di dua kabupaten di Sulawesi Tengah, termasuk juga dokumen pemekaran baik yang belum diterbitkan maupun yang sudah diterbitkan berupa Koran dan sebagainya.

Tahap Kritik Sumber, pada tahap ini melakukan kritik intern untuk mendapatkan keotentikan sumber dan melakukan kritik ekstern untuk mendapatkan validitas sumber. Sumber-sumber sejarah pemekaran dan sumber-sumber tentang adanya konflik di Dua kabupaten akan disinkronisasi dengan kejadian-kejadian mulai dari usulan pemekaran hingga tercapainya pemekaran di kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong.

Tahap Interpretasi, tahap interpretasi melakukan pemberian makna terhadap sumber-sumber yang telah dikritik supaya dapat membentuk fakta sejarah. Pemberian makna terhadap sumber-sumber yang telah dilakukan kritik sangat penting dalam penulisan sejarah supaya mendapatkan arti penting dari sebuah fakta sejarah.

Tahap Historiografi, Tahap ini adalah tahap penulisan secara deksripsi diakronis (memanjang dalam waktu) dan secara sinkronis (melebar dalam ruang). Secara diakrinis akan melihat kronologi waktu mulai dari tuntutan pemekarn kabupaten Banggai kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong hingga tercaainya pemekaran. Sementara, uraian sinkronis akan menjeleskan penyebab terjadinya konflik dalam pemekaran sehingga melebar dalam ruang-ruang sosial sebagai pengembangan wacana laporan penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan metodologi sejarah dan menggunakan metode oral history atau wawancara sejarah dan menggunakan arsip sejarah. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan. Sumber-sumber yang ditemukan mulai dari Undang-undang, sumber primer dan sumber sekunder, antara lain: Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45394/uu-no-51-tahun-1999#:~:text=UU%20No.%2051%20Tahun%201999,Banggai%20Kepulauan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44437/uu-no-10-tahun-2002#:~:text=UU%20No.%2010%20Tahun%202002,Sulawesi%20Tengah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>. Karim, Abdul Gaffar (ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003). Neneng Sobibatu Rohmah yang berjudul :”Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten,” Jurnal CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.4, No.1, April 2018.

Konflik di wilayah Banggai sesungguhnya bias diperhatikan sejak Perjuangan Laginda melawan Belanda, baca: Juraid dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991); Jar'an Abd. Fatah, Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit; Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Ria Mardin, “Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali, “ dalam: Banggai Kepulauan

Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Pahlawan Rambe, Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999), Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003. Reinhard Nainggolan, “Demokrasi pada Kearifan Lokal,” Kompas, Senin 7 Mei 2007; Wilman Darsono, Mengais Rejeki di Ayunan Ombak (Skripsi S1 FKIP Untad 2006). Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama “Menjalankan” Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan. Kemudian, Haliadi, Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007. Kemudian, Haliadi, Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama,” Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Akhirnya, Haliadi, dkk., Sejarah Kabupaten Parigi Moutong (Yogyakarta, Ombak, 2012).

Brian Mc Nair. 2003. An Introduction To Political Communication. London and New York: Routledge, dalam: Nurlaina, Motif Aktor Lokal Dalam Kuota Pencalonan 120 Persen Partai Politik Lokal Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Aceh, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31824/187054017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik,” Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010, hal. 5-30. Loe Agustino dan Haliadi yang berjudul: “Pemikiran Politik Lokal: Sejarah Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah,” Jurnal Cosmogo, Vol. 1, No.2 (2015), hal. 345-376. Henk Schulte Noordholt, Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Anton Blok, *Wittgenstein en Elias: Een Methodische Richtlijn voor de Antropologie* (Athenaeum: Polak & Van Gennep. 1976).

Buku umum seperti: Haliadi dan Ismail, *Sejarah Sosial Sulawesi Tengah* (Palu: Hoga, 2019). Selanjutnya, Ted Robert Guur, *Why Men Rebel* (Princeton University Press, 1970; revised edition Paradigm Publishers, 2010). Juga, Henry Muddick, 1966, ***Democracy, Decentralization an Development, Reprinted London, Asia Publishing House***, hlm 23. Diterjemahkan bebas dengan judul, ***Desentralisasi dalam Praktek***, Cetakan I, Pustaka Kendi, Yogyakarta, 2004, hlm, 34. Juga, Koesoemahatmadja, 1979, ***Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia***, Binacipta, Bandung. Dikutip oleh M. Laica Marzuki dalam ***Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm, 151. M. Laica Marzuki, 2006, ***Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm, 161. Syaukani, HR dkk, 2004, ***Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan***, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta, hlm. 173.

Mengadopsi dari Guru saya Bapak Dr. Hedy shri Ahimsa Putra dalam makalahnya yang berjudul: “Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Adakah Hubungannya, disampaikan pada Dies Natalis ke-55 Fakultas sastra UGM tanggal 24 Maret 2001, hlm. 11. Penulis orang Banggai seperti Hasdin Mondiga, Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda (Jakarta: LP2M, 2007), hal. 61. Masri Singarimbun dkk, Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku (Yogyakarta: PPSK UGM dan BPS, 1980), hal. 229; Volkstelling 1920 dan Volkstelling 1930. Sebagai perbandingan perkembangan penduduk itu kelihatan meningkat terus karena tahun 1971 sebanyak 181.698, 1980 sebanyak 268.203, dan pada tahun 1990 sebanyak 347.335 jiwa. Ide ini, sekarang sedang diperjuangkan menjadi DOB baru yakni Provinsi Sulawesi Timur yang berkedudukan di Luwuk Banggai. Haliadi, *Reformasi di Tingkat Lokal Sulawesi Tengah (Kasus Banggai dan Parigi Moutong)*, Kertas Kerja yang belum diterbitkan, 2016, hal. 1. Wawancara Hideo Amir, Hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, di Luwuk Kabupaten Banggai.

Machmud, HK. *Babad Banggai Sepintas Kilas* (Jakarta/Banggai: tanpa penerbit: 1986).

Konflik di wilayah Banggai sesungguhnya bias diperhatikan sejak Perjuangan Laginda melawan Belanda, baca: Juraid dkk., *Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah* (Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991); Jar'an Abd. Fatah, *Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali*, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit; *Banggai Kepulauan Dalam Cerita* (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Ria Mardin, "Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali, " dalam: *Banggai Kepulauan Dalam Cerita* (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Pahlawan Rambe, *Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999)*, Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003. Reinhard Nainggolan, "Demokrasi pada Kearifan Lokal," Kompas, Senin 7 Mei 2007; Wilman Darsono, *Mengais Rejeki di Ayunan Ombak* (Skripsi S1 FKIP Untad 2006). Irwan Zaman (Iwan), *Kesaksian Atas Nama "Menjalankan" Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai*, tidak diterbitkan. Haliadi, *Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi*, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007.

Haliadi, *Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama,*" Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Wawancara Syarif Uda'a, Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di Banggai Kabupaten Banggai Laut. Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilat* (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986); baca juga: JJ. Dormier, *Hukum Adat banggai VI* (Tanpa tempat dan penerbit, 1945); juga orang Banggai menyebar di wilayah Banggai, Liang, Bangkurung, Bulagi, Tinangkung, Buko, dan Totikum, sementara wilayah Banggai Darat tersebar di Balantak, Lamala, Bunta,

pagimana, Batui, Kintom, Luwuk dalam: Masyhuddin Masyhuda, *Etnik dan Logat di Sulawesi Tengah* (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 1991).

Hasdin Mondika, *Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis* (Jakarta: LP2M, 2008), hal. Vii. Wawancara dengan H. Ahmad Sombali, hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Bongganan Salakan Kabupaten banggai Kepulauan. Kemudian, Resolusi Nomor 1/DPRDGR/1966, Benedict R.O'G. Anderson, *KUASA-KATA Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 1990), hal. 207-208. Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hal. 282. Barbara Sillars Harvey, *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati* (Pengantar: Alfian) (Jakarta: Grafiti Pers, 1989/1984), hal. 203. M.C. Ricklefst, *A History of Modern Indonesia, since c.1300, second edition* (Basingstoke and London: The Macmilan Press, Ltd., 1993). Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar: dari Patriot hingga Pemberontak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hal. 1997. R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991/1997), hal. 110-111. The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II* (Yogyakarta: Liberty, 1994), hal.206. Benedict R.O'G. Anderson, *KUASA-KATA Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 1990), hal. 207-208. Andi Mas Ulun, *Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala: satu sanggahan* (Palu: Yayasan Pudjananti Indonesia, 1992), hal. 10-11. Wawancara dengan Tim Tekhnis dan Presidium Forum Silaturahmi Warga Parigi-Moutong, Pernyataan dan Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Pemekaran Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, 2000, hal.6. Pada tahun 1963 ini Ketua Panitia dipegang oleh A.P.Tagunu dan Sekretaris H. Marasobu, keduanya dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Arsip tentang Resolusi DPRD-GR, nomor: 1/DPRD-GR/1966, tanggal 16 Pebruari 1966 ditetapkan di Poso ditandatangani oleh Z. Abd. Rauf, diketahui oleh Gubernur Anwar Gelar datuk Majo Basah Nan Kuning. Halim Kariming, Catatan Memori

Penuntutan Pembentukan Kabupaten, makalah disampaikan di Hotel Oktaria Parigi. D. Daly adalah seorang Komandan Distrik (Dandist) Kepolisian Parigi.

Tokoh Halim Kariming, satu-satunya tokoh tahun 1960an yang masih sempat kami wawancarai. Dia lahir di Bone tanggal 13 Juli 1937 dari Orang tuanya Kariming Dg. Pasolong alm. dan Hj. Hame alm. Dan memulai karirnya sebagai seorang Guru SD Negeri 1 Parigi sejak tahun 1958 hingga 1977 dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Donggala pada tahun 1971-1977 dari aktifitasnya sebagai Ketua cabang Partai Syarikat Islam Indonesia cabang Parigi. Demikian juga, tokoh Rusdi Toana merupakan tokoh masyarakat dan intelektual serta aktif sebagai wartawan di Sulawesi Tengah yang aktif sebagai wartawan dalam mendirikan koran **Mercusuar**, **baca:** Rusdi Toana dan Abd. Karim Mbouw, Mengungkap Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah di Arena Sejarah Bangsa Indonesia, ang diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan Sejarah dan Pembangunan Sulteng Fakultas Sospol UNTAD (Cabang UNHAS) di Palu pada bulan April 1980, hal. 28. Tokoh Ahim Dg. Rahmatu adalah seorang politisi PSII yang menjadi anggota DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah 1965 dan 1970, **baca:** Malaga, Memori Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Depan Sidang DPRD-GR Prov. Sulawesi Tengah 6 Oktober 1971, hal.75 dan 77. Almarhum Dr.Kaleb pernah menjabat sebagai Bupati Donggala periode 1979-1984 dengan SK mendagri nomor Pem/7/42976, tanggal 30 Desember 1978. Dia Seorang birokrat perempuan di Kecamatan Parigi. Alfian, Hasil pemilu tahun 1955 untuk DPR (Jakarta: Leknas, 1971), hal. 152-154. Tokoh Ahim Dg. Rahmatu adalah seorang politisi PSII yang menjadi anggota DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah 1965 dan 1970, **baca:** Malaga, Memori Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Depan Sidang DPRD-GR Prov. Sulawesi Tengah 6 Oktober 1971, hal.75 dan 77.

B. PEMBAHASAN PENELITIAN

B. 1. Dari Kabupaten Banggai Ke Banggai Kepulauan dan Banggai Laut

Ada kontradiksi antara kekinian dan masa lalu Banggai sebagai sebuah dinamika sejarah lokal di Indonesia yakni pada satu sisi pada tahun 1999 hingga tahun 2013 Banggai telah terbagi menjadi tiga Kabupaten kecil (Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut), sementara di masa lalu Kerajaan Banggai dianggap sebagai satu kesatuan sosio-politik kerajaan yang besar dan monumental di sebelah Timur Pulau Sulawesi. Hal ini sesuai dengan memori yang dipaparkan oleh seorang aktifis muda Banggai yang bernama Hasdin Mondiga dalam bukunya yang berjudul “Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda.” Hasdin Mondiga melihat bahwa fluktuasi nama Ping-Yai (Abd ke-11), Benggawi (abd ke-14), Tano Bolukan (abd ke-15), dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kini) yang hadir dalam bingkai Indonesia dengan menyisakan “berbagai kemerosotan, penghinaan, penghisapan, dan penindasan.”²¹ Secara demografis, Banggai pada tahun 1920 memiliki penduduk sejumlah 76.633 jiwa sepuluh tahun kemudian yakni tahun 1930 penduduk Banggai itu berjumlah 95. 515 jiwa. Keadaan itu berubah lagi pada tahun 1961 bahwa penduduk Banggai 144.879 jiwa.²² Jadi, transformasi penduduk Banggai selama kurang lebih 40 tahun mengalami peningkatan dari 76 ribu jiwa menjadi 144 ribu hampir separuh. Keadaan itu menunjukkan bahwa tingkat mobilitas penduduk Banggai sangat tinggi dan perubahan itu harus diselingi oleh kebijakan yang pro pada mobilitas yang tinggi, dengan demikian sejarah lokal mengajarkan bahwa dinamika lokal yang dinamis harus mendapat perhatian yang serius terutama penulisan sejarah berdasar analisis historis yang maksimal dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.²³

²¹ Hasdin Mondiga, *Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda* (Jakarta: LP2M, 2007), hal. 61.

²² Masri Singarimbun dkk, *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku* (Yogyakarta: PPSK UGM dan BPS, 1980), hal. 229; *Volkstelling 1920 dan Volkstelling 1930*.

Pemikiran mengenai satu kesatuan Banggai terpecah dan terpetakan oleh sebuah Kolonisasi Belanda, Pendudukan Jepang, dan Indonesia hingga tahun 2000-an. Kita tidak pernah menyadari bahwa konsep-konsep lokal (*local genius*) akan menjadi sebuah konsep tata Negara yang memadai untuk sebuah cita-cita bersama seperti ide Banggai Darussalam yang menurut penulis bukan sekadar kabupaten, kenapa tidak menjadi sebuah ide “Propinsi Banggai Darussalam.”²⁴ Pemekaran dari Kabupaten Poso menjadi tiga kabupaten di Wilayah Banggai merupakan upaya masyarakat untuk menuju cita-cita itu, namun pertanyaannya adalah bagaimana nilai sejarah/budaya (Kerajaan Banggai) menjadi faktor pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) melalui pemekaran wilayah dan apa implikasinya terhadap aspek sosial-ekonomi (makro) dan budaya/tradisi maritim di Indonesia Timur?

Fenomena pemekaran seperti itu termasuk dalam kajian subnasional atau kajian sejarah dinamika sejarah sosial-politik lokal yang masih menarik. Kajian mengenai sejarah subnasional pasca Orde Baru di Indonesia masih menarik perhatian untuk dikembangkan. Keadaan ini karena proses sosio-politik subnasional membawa implikasi pada dampak diametral. Keadaan ini disebabkan oleh tumpangtindihnya kepentingan pusat dan daerah serta dinamika keragaman lokal, ditambah lagi dengan otonomi daerah dan pemekaran daerah (*redistricting*). Percampuran itulah yang kemudian memberikan dinamika yang unik dan khas dalam dinamika sosio-politik lokal karena dampaknya yang bervariasi. Sederhanya, keanekaragaman implikasi tersebut menghasilkan dua hal, yakni menghasilkan kebaikan bersama untuk kepentingan masyarakat dan memberikan dampak sebaliknya. Kebaikan bersama yang terjadi adalah agenda pelayanan pemerintahan yang lebih baik kepada rakyat semakin meningkat, penyediaan infrastruktur yang lebih luas, pelayanan kesehatan yang lebih memuaskan dan sikap pegawai yang lebih mengabdikan kepada masyarakat. Selain itu, proses perubahan yang dapat dilihat adalah rakyat dibenarkan untuk memilih kepala daerah

²³ Sebagai perbandingan perkembangan penduduk itu kelihatan meningkat terus karena tahun 1971 sebanyak 181.698, 1980 sebanyak 268.203, dan pada tahun 1990 sebanyak 347.335 jiwa.

²⁴ Ide ini, sekarang sedang diperjuangkan menjadi DOB baru yakni Provinsi Sulawesi Timur yang berkedudukan di Luwuk Banggai.

langsung dan sekaligus mensyaratkan masyarakat lokal memilih pemimpin sendiri dan juga terjadinya pembagian keuangan pusat dan daerah yang lebih adil.²⁵ Kecemerlangan lokal Kerajaan Banggai yang masih berpengaruh bagi pemekaran tiga Kabupaten dari Kabupaten Poso akan berusaha digambarkan dalam perkembangan sejarah lokal maritim di Indonesia Timur untuk menyambut ide membangun Indonesia dari pinggir.

Pemekaran Tiga Kabupaten Banggai di Sulawesi Timur

Latar belakang sejarah pemekaran wilayah Kerajaan Banggai telah dilakukan sejak masa Kolonial Belanda dan Masa Orde Lama dan Orde Baru serta reformasi di Indonesia. Transformasi pemekaran pada masa kolonial di wilayah Banggai antara lain Pertama, Pada awal abad ke-20 (baca: tahun 1908) Hindia Belanda membagi daerah di Indonesia menjadi dua bagian utama yakni daerah yang dikontrol langsung (*Rechtsreeksbestuursgebied* atau *Governementslanden*) dan daerah yang tidak langsung dikontrol (*Zelfbestuurslandschappen* atau *Vorstelanden*). Daerah yang dikontrol langsung dibagi lagi menjadi *afdeelingen* dan sub bagiannya *onder afdeelingen*. Daerah Sulawesi Tengah termasuk Banggai Kepulauan masuk dalam wilayah Gubernur Makassar yang terdiri atas *Afdeling Oost Celebes* dan *Afdeling of Midden Celebes*, meliputi *onder afdeling-onder afdeling*. Pada waktu ini, *onder afdeling* Kolonodale dan *onder afdeling (oa)* Banggai masuk dalam wilayah *Afdeling Oost Celebes* dengan ibukota di Bau-Bau di Pulau Buton.

Kedua, pada tahun 1919 wilayah Sulawesi Tengah dibagi dua *afdeling* yakni *afdeling* Donggala: *oa* Donggala, Tolitoli, dan Palu; *afdeling* Poso terdiri atas: *oa*. Poso, *oa*. Parigi, *oa*. Kolonodale, dan *oa*. Banggai di Banggai. Ketiga, 1926 *lanschaap* Banggai dibagi menjadi *oa*. Banggai Darat di Luwuk dan *oa*. Banggai Laut di Banggai yang masuk dalam Keresidenan Manado. Keresidenan Manado di Sulawesi Tengah terdiri atas *oa*. Donggala (Banawa, Tawaeli), Palu (Palu, Sigi Biromaru, Dolo, dan Kulawi), Poso (Tojo Una-Una, Poso, Lore), Parigi (Parigi, Moutong), Kolonodale (Mori, Bungku), Banggai (Banggai Darat di Luwuk, Banggai Laut di Banggai), Tolitoli, dan Buol. Inilah sumber inspirasi dari

²⁵ Haliadi, Reformasi di Tingkat Lokal Sulawesi Tengah (Kasus Banggai dan Parigi Moutong), Kertas Kerja yang belum diterbitkan, 2016, hal. 1.

pembagian wilayah pemekaran Banggai Kepulauan di tahun 1999. Keempat, 1938 Sulawesi Tengah terdiri atas oa. Donggala (Banawa, Tawaeli), Palu (Palu, Sigi Biromaru, Dolo, Kulawi), Poso (Tojo, Poso, Lore, Una-Una), Parigi (Parigi, Moutong), Luwuk (Kerajaan Banggai Laut di Banggai dan Banggai Darat di Luwuk), dan Tolitoli (Kerajaan Tolitoli). Kelima, 1942 pada pendudukan Jepang antara tahun 1942-1945, distrik diganti menjadi GUN, kepala distrik menjadi GUNCO, Raja menjadi SUCO dan satu hal yang perlu mendapat catatan adalah ibukota Banggai dipindahkan ke Luwuk. Hal ini dilakukan oleh H.S.A. Amir karena mendapatkan legitimasi politik dari pendudukan Jepang di Luwuk. Legitimasi ini dapat dilihat dari nama anaknya yang bernama Hideo sebagai pemberian nama oleh Jepang yang berkuasa di Luwuk.²⁶

Kemudian, pemekaran wilayah Banggai dilakukan pada masa Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi dimulai berdasarkan UU No. 29 tahun 1959 dan SK Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara Tengah tanggal 4 Pebruari 1961 no. 01/Pem/1961, wilayah Banggai dibagi dalam: Kewedanan Banggai Darat dan Banggai Kepulauan. Banggai Darat terdiri atas: Kecamatan Luwuk (distrik Luwuk, Batui, Kintom, Bonebabakal, dan Balantak), Kecamatan Teluk Tomini (Bunta, Pagimana). Wilayah Banggai Kepulauan dibagi dalam: Kecamatan Banggai (distrik Banggai, Labobo Bangkurung, dan Totikum), Kecamatan Tinangkung (Distrik Salakan, Buko-Tataba, Bulagi, dan Liang). Ibukota berada di Luwuk.²⁷ Kedelapan, Undang-Undang no.18 tahun 1965 dan Surat Keputusan Gubernur KDH. Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 15 Januari 1964 no. 25/1964 Kabupaten Banggai meliputi wilayah: Kecamatan Labobo Bangkurung ibukota di Mansalean, Kecamatan Banggai di Banggai, Totikum di Sambiut, Tinangkung di Salakan, Bulagi di Bulagi, Liang di Liang, Buko-Tataba di Buko, Batui di Batui, Bunta di Bunta, Kintom di Kintom, Pagimana di Pagimana, Luwuk di Luwuk, Lamala di Bonebabakal, dan Balantak di Balantak. Sistem ini masih mengikuti pembagian pada zaman Kerajaan Banggai dulu yakni tujuh wilayah Banggai Laut dan tujuh

²⁶ Wawancara Hideo Amir, Hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, di Luwuk Kabupaten Banggai.

²⁷ Machmud, HK. *Babad Banggai Sepintas Kilas* (Jakarta/Banggai: tanpa penerbit: 1986).

wilayah Banggai Darat. Masyarakat Banggai baik di darat maupun di laut mengenal dua Kota besar Banggai yakni Kota Banggai dan Kota Luwuk. Kedua kota inilah yang representatif menjadi Kota di wilayah dua Banggai. Ibukota Kabupaten Banggai di Luwuk. Sejak tahun 1964 Badan Penuntut Daerah Otonom Masyarakat Banggai Kepulauan termasuk Dewan Hadat telah memperjuangkan Pemekaran Banggai untuk membentuk Kabupaten Banggai Kepulauan hingga tahun 1999, setelah pemekaran tercapai dengan munculnya UU no. 51 tahun 1999 (pasal 11) ibukota harus dipindahkan dari Kota Banggai ke Kota Salakan. Perpindahan ibukota secara sosio-kultural merubah secara revolusioner (bukan secara evolusi) terutama kejadian 28 Pebruari 2007 dengan empat orang korban masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Menurut hasil penelitian hal itu adalah bukti bahwa Negara ini tidak dapat memanajemeni perubahan konflik komunal menjadi kekerasan kolektif. Kasus Banggai Kepulauan pada tahun bulan 27 Pebruari 2007 adalah bukti bahwa Negara tidak bias menata secara baik kasus-kasus konflik komunal di daerah. Awal mula konflik di Banggai Kepulauan²⁸ diawali oleh munculnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 sebagai regulasi pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan, pada pasal 11 dinyatakan bahwa “selambat-lambatnya dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak peresmian Kabupaten Banggai Kepulauan, kedudukan ibukota di Banggai dipindahkan ke Salakan.” Munculnya pasal 11 tersebut menurut “tokoh-tokoh Kota Banggai dianggap sebagai “pasal siluman” yang sengaja dibuat oleh penguasa

²⁸ Konflik di wilayah Banggai sesungguhnya bias diperhatikan sejak Perjuangan Laginda melawan Belanda, baca: Juraid dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991); Jar'an Abd. Fatah, Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit; Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Ria Mardin, “Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali, “ dalam: Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000); Pahlawan Rambe, Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999), Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003. Reinhard Nainggolan, “Demokrasi pada Kearifan Lokal,” Kompas, Senin 7 Mei 2007; Wilman Darsono, Mengais Rejeki di Ayunan Ombak (Skripsi S1 FKIP Untad 2006).

Banggai yang bukan orang kelahiran Kota Banggai pada waktu itu yang kebetulan mereka memiliki akses ke DPR pusat padahal semua dokumen pengajuan pemekaran tidak ada satu lembarpun yang mendukung pasal tersebut tapi tiba-tiba muncul pasal 11 sebagai pemicu munculnya konflik. Tokoh yang memunculkan pasal tersebut disebutkan dalam catatan kesaksian Iwan Zaman yang langsung menyebutkan nama-nama tokoh kelompok kecil yakni “Trio Malingong bersaudara” seumpama: Irianto Malingong, Suleman Malingong, Israfil Malingong, Harman Pandipa, Darman Pandipa, Zainuddin Soti, Hasmoru Lampajoa, Abdi Sahido, dan beberapa lainnya di antara mereka, sekarang (baca 2007) ini menjadi Elit Politik Lokal di Bangkep mereka menjadi penguasa di lembaga Eksekutif dan Legislatif sebagai BUPATI, Wakil Ketua DPRD, Ketua Badan Kehormatan DPRD dan Ketua Fraksi Gabungan di DPRD Bangkep.²⁹ Kejadian ini sesungguhnya mengulang lagi atau mengorek kesalahan lama pemindahan Ibu Kota Banggai yang dilakukan oleh Belanda sejak tahun 1908 hingga 1938 yang membagi Kerajaan Banggai menjadi dua yakni Banggai Darat dan Banggai Laut dengan menyepelkan satu Banggai sebagai Ibukota. Juga pada masa Jepang, ibukota Banggai dipindahkan secara sewenang-wenang ke Luwuk dari Banggai. Kemudian, selanjutnya pada tahun 1960-an Kabupaten Banggai terbentuk dengan Ibukota di Luwuk dan tetap menyepelkan posisi Banggai sebagai bekas Ibu Kota Kerajaan Banggai beserta hak-hak adatnya.³⁰ Setelah benar-benar otonomi tercipta dan Banggai Kepulauan terbentuk sebagai Kabupaten otonom di era reformasi, ibukotanyapun dialihkan dari Banggai ke Salakan.³¹ Hal inilah yang dimaksudkan oleh Hasdin Mondika sebagai “pilunya tangisan jiwa-jiwa lemah yang hak-haknya dirampas,” maksudnya Negara telah merampas hak-hak

²⁹ Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama “Menjalankan” Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan.^{[L][SEP]}

³⁰ Haliadi, Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007.

³¹ Haliadi, Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama,” Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.^{[L][SEP]}

masyarakat beserta adat istiadat maupun kebanggaan sejarah Kerajaan Banggai.

Pindahnya ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Kota Banggai ke Ibu kota baru Salakan berdasarkan kemauan pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 diajukan oleh pemangku kepentingan Adat Banggai kepada Mahkamah Konstitusi namun dimentahkan untuk tidak lagi diproses. Pemangku kepentingan Kerajaan Banggai yang dipimpin oleh Iskandar Zaman berusaha untuk memperjuangkan kembali pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dengan membentuk Kabupaten Banggai Laut. Perjuangan pemekaran yang dinakhodai oleh keturunan Raja Banggai yang bernama Iskandar Zaman pada akhirnya berhasil dibentuk dengan nama Kabupaten Banggai Laut yang beribukota di Banggai berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2013.³² Tokoh Iskandar Zaman merupakan seorang tokoh keturunan Raja Awaludin raja Banggai ke-20 dan juga seorang pengusaha yang meninggal sebelum menyaksikan terbentuknya Kabupaten Banggai Laut yang diperjuangkannya.

Implikasi Kehidupan Sosial-Ekonomi dan Budaya Maritim Masyarakat Banggai

Sumber penting yang otentik dan valid untuk melihat konflik dan kekerasan kolektif di tingkat lokal adalah historiografi lokal yang terbit pada jiwa zaman dimana konflik itu terjadi. Historiografi Banggai³³ (baca: Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan) yang menarik terbit di Jakarta medio 2008 adalah buku yang berjudul “Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis,”³⁴ dikarang oleh seorang tokoh pemuda Banggai di

³² Wawancara Syarif Uda’a, Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di Banggai Kabupaten Banggai Laut.

³³ Machmud HK., Babad Banggai Sepintas Kilat (Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986); baca juga: JJ. Dormier, Hukum Adat banggai VI (Tanpa tempat dan penerbit, 1945); juga orang Banggai menyebar di wilayah Banggai, Liang, Bangkurung, Bulagi, Tinangkung, Buko, dan Totikum, sementara wilayah Banggai Darat tersebar di Balantak, Lamala, Bunta, pagimana, Batui, Kintom, Luwuk dalam: Masyhuddin Masyhuda, Etnik dan Logat di Sulawesi Tengah (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 1991).

³⁴ Hasdin Mondika, Banggai Darussalam Solusi di Tengah Krisis (Jakarta:

Jakarta. Buku ini adalah teriakan dari seorang anak muda Hasdin Mondika yang tercermin dalam pengantarnya yang menyatakan bahwa: “Buku ini ditulis dalam kondisi keprihatinan. Dalam atmosfir udara yang teramat ‘kotor dan tercemari’. Dimana ikhlasnya hati, khususnya doa dan indahnya senyuman telah ternodai dengan panasnya sumpah serapah, darah, kemurkaan dan kutukan sampai pada pilunya tangisan jiwa-jiwa lemah yang hak-haknya dirampas.” Menariknya buku ini adalah edisi revisi dari buku sejarah Banggai yang berjudul: “Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda,”³⁵ yang diterbitkan pada tahun 2007 setahun sebelum buku Banggai Darussalam. Mondika melihat perkembangan Orang Banggai termasuk peradaban Banggai yang kelihatan dalam sebuah judul sub bab yang berbunyi “Terjajah Setelah Meng-Indonesia” maksudnya setelah Banggai masuk ke Indonesia (baca NKRI) terjajah dan terjajah lagi. Hal inilah yang menjadi akar konflik di Kabupaten Banggai maupun Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep), terutama kasus pemindahan Ibu Kota dari Banggai ke Salakan pada media awal tahun 2007 di Bangkep.

Implikasi negatif dari pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Banggai Laut adalah nelayan yang mencari ikan di wilayah laut kedua kabupaten mulai ada pembatasan-pembatasan yang tidak pernah terjadi sebelum pemekaran di masa lalu. Menurut keterangan seorang pengusaha ikan di Kampung Bajo Bonggan Salakan dinyatakan bahwa nelayan Bajo yang memancing di wilayah Kabupaten Banggai Laut diusir dari tempat itu. Kebiasaan masyarakat nelayan sebelum pemekaran masih mendapatkan hasil yang dapat mendukung kehidupan atau kesejahteraan mereka karena Rep atau karang yang masih menyediakan ikan banyak terutama di Rep Babakal, Rep sabang, dan Rep Merpati yang didukung oleh kebiasaan berbagi atau mencari ikan secara bersama tanpa ada gangguan karena laut milik bersama, namun ketika terjadi pemekaran maka terjadi pembatasan-pembatasan wilayah yang juga pembatasan itu di bawa ke wilayah laut sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan nelayan lokal Banggai.³⁶

LP2M, 2008), hal. Vii.

³⁵ Hasdin Mondika, *Loc. Cit.*

³⁶ Wawancara dengan H. Ahmad Sombali, hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 di Bonggan Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan.

B.2 KABUPATEN PARIGI MOUTONG: Benih Pemekaran sejak 1963

Salah satu fenomena menarik pada tahun 1960-an di Sulawesi Tengah adalah adanya rancangan pemekaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) pada tahun 1969 atas Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Sembilan Kabupaten dan Kota.³⁷ Secara teoretis, Benedict R. O’G. Anderson dalam bukunya *Kuasa Kata* dinyatakan bahwa: “...dan tak dapat diingkari juga, dalam beberapa hal, rezim Kolonial di Vietnam dan Indonesia juga berkontribusi pada kemajuan mereka yang dijajah. Bagaimanapun, hal yang jelas adalah kepentingan partisipatif bangsa hampir sepenuhnya diabaikan dan ditekan oleh pihak penjajah.”³⁸ Fenomena pasca kolonial di Indonesia secara umum merupakan dampak dari penjajahan seperti munculnya gerakan pembangkangan dan termasuk otonomi (pembebasan ke arah nasib sendiri) termasuk pemekaran yang dicanangkan oleh politisi lokal di tahun 1960-an.

Kajian ini akan merekonstruksi sebuah penggalan sejarah Parigi Moutong di tahun 1960-an dimana terdapat benih-benih awal perjuangan pemekaran yang dilakukan oleh para politisi lokal pada waktu itu. Pertanyaannya, Kapan awal mula perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong?, Bagaimana proses perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1960-an?, dan Mengapa Perjuangan politisi dan masyarakat Parigi Moutong tidak berhasil memekarkan Kabupaten Parigi Moutong? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan metodologi (penelitian dan penulisan) sejarah dengan judul makalah “KABUPATEN PARIGI MOUTONG: Benih Pemekaran sejak 1963.”

³⁷ Resolusi Nomor 1/DPRDGR/1966,

³⁸ Benedict R.O’G. Anderson, *KUASA-KATA Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 1990), hal. 207-208.

Benih Pemekaran di Tahun 1960-an

Otonomi Daerah pada masa Orde Lama menurut Barbara Sillar Harvey³⁹ bahwa otonomi di Indonesia termasuk di Sulawesi Tengah dilaksanakan “setengah hati”⁴⁰ artinya tidak sepenuhnya direalisasikan hanya sebatas diperjuangkan. Banyak pengamat menyatakan bahwa memang masa Orde Lama di Indonesia baru terbatas pada masa “percobaan demokrasi.”⁴¹ Banyak bukti yang menunjukkan hal ini, seperti: tuntutan Abdul Qahhar Mudzakkar⁴² dengan TKR dan DI/TII-nya tidak mendapat tanggapan yang berarti di Jakarta, demikian juga Vence Sumual⁴³ dengan PRRI/PERMESTA-nya juga tidak mendapatkan tempat di Jakarta. Semua itu perjuangan kearah otonomi daerah, bahkan Demokrasi Terpimpin yang digulirkan oleh Presiden Soekarno sendiri tidak mendapatkan tempat di Indonesia hingga kita kembali ke Demokrasi Pancasila⁴⁴ yang efektif terlaksana pada masa pemerintahan Orde Baru 1966-1986. Perjuangan otonomi daerah untuk memekarkan pemerintahan otonom di tingkat kabupaten juga pada masa Orde Lama tidak pernah terealisasi di Sulawesi Tengah terutama di Donggala untuk Kabupaten Parigi Moutong. Masa Postkolonial ini di Indonesia dinilai oleh Benedict R. O’G. Anderson bahwa: “...dan

³⁹ Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII* (Jakarta: Grafiti Pers, 1989), hal. 282.

⁴⁰ Barbara Sillars Harvey, *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati* (Pengantar: Alfian) (Jakarta: Grafiti Pers, 1989/1984), hal. 203.

⁴¹ M.C. Ricklefst, *A History of Modern Indonesia, since c.1300, second edition* (Basingstoke and London: The Macmillan Press, Ltd., 1993)

⁴² Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar: dari Patriot hingga Pemberontak* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hal. 1997.

⁴³ R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991/1997), hal. 110-111.

⁴⁴ The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II* (Yogyakarta: Liberty, 1994), hal.206.

tak dapat diingkari juga, dalam beberapa hal, rezim Kolonial di Vietnam dan Indonesia juga berkontribusi pada kemajuan mereka yang dijajah. Bagaimanapun, hal yang jelas adalah kepentingan partisipatif bangsa hampir sepenuhnya diabaikan dan ditekan oleh pihak penjajah.”⁴⁵

Latar belakang dari upaya pemekaran pada tahun 1960-an didorong oleh terbentuknya Provinsi Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 151/1960 tanggal 13 Desember 1960 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara Tengah.⁴⁶ Kemudian, Daerah otonom Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala dan Poso dimekarkan menjadi 4 daerah otonom, yakni: Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala di Palu, Kabupaten Daerah Tingkat II Poso di Poso, Kabupaten Daerah Tingkat II Tolitoli di Tolitoli, dan Banggai di Luwuk. Sejak itu upaya pemekaran kabupaten baru dan Provinsi Sulawesi Tengah diupayakan oleh tokoh-tokoh lokal terutama para bangsawan dan politisi lokal seperti penuntutan Kabupaten Parigi Moutong oleh politisi lokal penting antara lain Andi Pelawa Tagunu, Ahim Dg. Rahmatu, Arsid Pasau dan lain-lain.

Pada waktu itu keadaan Parigi Moutong pada tahun 1960-an masih berstatus dalam keadaan perubahan-perubahan dari kewedanan hasil perubahan dari Swapraja Parigi kepada Pembantu/Penghubung Bupati Kepala Daerah Donggala di Parigi. Adapun pejabat yang pernah menjadi Wedana di Parigi sebanyak empat orang Wedana antara lain: R. Datau, Ruda Lamakarate, Ramli Noer, dan Manupil. Sedangkan, yang pernah menjabat sebagai pembantu Bupati/Penghubung masing-masing: Dj. Lembah, Mochtar Tadji, M.W.Borman, Sahid Tjobo, H. Andi Ada

⁴⁵ Benedict R.O’G. Anderson, *KUASA-KATA Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 1990), hal. 207-208.

⁴⁶ Andi Mas Ulun, *Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala: satu sanggahan* (Palu: Yayasan Pudjananti Indonesia, 1992), hal. 10-11.

Tagunu, Efendi Dg. Pawara, dan Tumange.⁴⁷ Mereka ini berkedudukan selaku pejabat di Parigi Kabupaten Donggala sebagai pegawai dalam pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena jauhnya akses masyarakat Parigi Moutong ke Donggala sebagai induk, tokoh-tokoh masyarakat melakukan perjuangan untuk memekarkan wilayah Parigi Moutong dari kabupaten Donggala menjadi daerah otonom sendiri.

Perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1960-an telah dilakukan oleh partai-partai politik di Kabupaten Donggala pada waktu itu. Rapat pertama untuk perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 1963⁴⁸ hingga terbentuknya resolusi DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1966 tentang pengusulan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 9 kabupaten: Donggala, Poso, Banggai, Buol/Tolitoli, Parigi Moutong, Pamone-Lore, Tojo/Una-Una, Bungku-Mori, Banggai Barat, Banggai Laut, Dondo, dan Buol.⁴⁹ Sebelum resolusi ini ditetapkan, masyarakat Parigi Moutong sudah berusaha memperjuangkannya melalui organisasi politik sejak tanggal 8 Juni 1963 yang menuntut Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Resolusi DPRD-GR. Pada tahun yang sama yakni pada tahun 1963 sudah ada delegasi Panitia Penuntutan untuk menghadap Asisten Menteri Dalam Negeri urusan Kepulauan Sulawesi dan Maluku di palu pada tanggal 25 Juli 1963. Kemudian, pada tanggal 12 Agustus 1963 Panitia Penuntut Kabupaten Parigi-Moutong di Lapangan Toraranga Parigi.

⁴⁷ Tim Tekhnis dan Presidium Forum Silaturahmi Warga Parigi-Moutong, Pernyataan dan Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Pemekaran Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, 2000, hal.6.

⁴⁸ Pada tahun 1963 ini Ketua Panitia dipegang oleh A.P.Tagunu dan Sekretaris H. Marasobu, keduanya dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

⁴⁹ Resolusi DPRD-GR, nomor: 1/DPRD-GR/1966, tanggal 16 Pebruari 1966 ditetapkan di Poso ditandatangani oleh Z. Abd. Rauf, diketahui oleh Gubernur Anwar Gelar datuk Majo Basah Nan Kuning.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 1966⁵⁰ lanjutan penuntutan dilakukan ke Jakarta dengan panitia pembaharuan terdiri atas: D. Daly⁵¹ sebagai penasehat, Abd. Halim Kariming⁵² sebagai sekretaris, A. Pasau sebagai bendahara, dan Jurubicara masing-masing: Dantje Borman, Rusdi Toana,⁵³ dan Ahim Dg. Rahmatu.⁵⁴ Tugas delegasi ke Jakarta pertama kalinya ke Palu untuk: Meminta dukungan administrasi atas terbentuknya Kabupaten Parigi Moutong, meminta dukungan untuk keberangkatan delegasi Kabupaten Parigi Moutong ke Jakarta, Menuntut beberapa hal yang dapat membantu persiapan realisasi Kabupaten Parigi Moutong seperti masalah pembangunan, perwakilan eks Kewedanan Parigi di DPRDGR Kabupaten Donggala dan adanya seorang anggota BPH dari eks Kewedanan Parigi. Delegasi ini

⁵⁰ Halim Kariming, Catatan Memori Penuntutan Pembentukan Kabupaten, makalah disampaikan di Hotel Oktaria Parigi.

⁵¹ D. Daly adalah seorang Komandan Distrik (Dandist) Kepolisian Parigi.

⁵² Tokoh Halim Kariming, satu-satunya tokoh tahun 1960an yang masih sempat kami wawancarai. Dia lahir di Bone tanggal 13 Juli 1937 dari Orang tuanya Kariming Dg. Pasolong alm. dan Hj. Hame alm. Dan memulai karirnya sebagai seorang Guru SD Negeri 1 Parigi sejak tahun 1958 hingga 1977 dan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Donggala pada tahun 1971-1977 dari aktifitasnya sebagai Ketua cabang Partai Syarikat Islam Indonesia cabang Parigi.

⁵³ Rusdi Toana merupakan tokoh masyarakat dan intelektual serta aktif sebagai wartawan di Sulawesi Tengah yang aktif sebagai wartawan dalam mendirikan koran **Mercusuar**, **baca:** Rusdi Toana dan Abd. Karim Mbouw, Mengungkap Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah di Arena Sejarah Bangsa Indonesia, ang diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan Sejarah dan Pembangunan Sulteng Fakultas Sospol UNTAD (Cabang UNHAS) di Palu pada bulan April 1980, hal. 28.

⁵⁴ Tokoh Ahim Dg. Rahmatu adalah seorang politisi PSII yang menjadi anggota DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah 1965 dan 1970, **baca:** Malaga, Memori Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Depan Sidang DPRD-GR Prov. Sulawesi Tengah 6 Oktober 1971, hal.75 dan 77.

diterima oleh R.H. Ticoalu mewakili Gubernur, Dd.M.Lamakarate, Bupati Donggala Zainuddin Abd. Rauf, Ketua DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah, dan K.H.Z. Betalemba Ketua DPRD-GR Kabupaten Donggala. Pada tanggal 12 Juli 1966 delegasi berangkat ke Jakarta dipimpin oleh Ketua Dantje Borman, Sekretaris Abd. Halim Kariming, bendahara A. Passau, Penasehat D. Daly, Saleh Boring, dan Ahim Rahmatu. Keberangkatan mereka dibiayai oleh CV. Handy Jantra milik John Sibi. Long march tim ini di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 1966 menemui kepala bahagian otonomi Desentralisasi Depdagri Slamet Mulyono, besoknya menemui Kolonel Gatot Suwagio di departemen dalam negeri selaku Direktur Otonomi Daerah, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1966 menemui Soemarman Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan pada tanggal 15 Agustus 1966 diterima oleh tokoh PSII Bapak Ishak Moro anggota DPR-GR Pusat dari Komisi B (OTDA). Delegasi ini tidak sempat menemui Mendagri dan Ketua DPRGR Pusat karena sedang bertugas ke luar daerah. Usaha untuk mengutus panitia ke Jakarta tidak sampai disitu, tetapi panitia membentuk delegasi kedua pada tanggal 18 September 1967 yang dipimpin oleh Ketua Arsit Pasau, Sekretaris Abd. Halim Kariming, anggota D. Daly dan Saleh Barung. Delegasi kedua ini dibiayai oleh Andi Sose yang membeli kopra di Parigi Moutong dari koperasi Kopra pada saat itu. Mereka menemui Mahmuddin Noer Dirjen OTDA, juga pada tanggal 30 September 1967 menemui Ishak Moro anggota DPRGR Pusat, juga pada tanggal 2 Oktober 1967 menemui Brigjen Polisi Domo Pranoto Ketua Komisi B DPRGR Pusat. Hasil usaha yang dilakukan delegasi ke Jakarta dari Panitia Penuntut Kabupaten Parigi Moutong adalah RUU usul inisiatif anggota DPRGR Ishak Moro dan kawan-kawan pada tanggal 30 November 1968 nomor: C I-02/K/4035/DPRGR/1968, RUU ini didukung penuh oleh panitia dengan surat pernyataan nomor: 035-B/1969 dimana panitia mendesak RUU menjadi UU pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Menurut Halim Kariming, kegiatan penuntutan Kabupaten Parigi Moutong berhenti pada tahun 1970-an karena para pelaku politik lokal sibuk dengan persiapan Pemilihan

Umum (Pemilu) 1971 sebagai awal pemilihan umum pada Masa Orde Baru di Kabupaten Donggala.

Partai politik yang berinisiatif sejak tahun 1963 untuk memperjuangkan Kabupaten Parigi Moutong hingga tahun 1969 yang menghasilkan susunan Panitia Realisasi Kabupaten Parigi Moutong hasil resafel yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 1969 oleh Andi Pelawa Tagunu dari PNI sebagai ketua, wakil Ketua empat orang, masing-masing: Ahim Dg. Rahmatu (PSII), Arsid Pasau (NU), A. Nento (PNI), M.P. Latjado (IP-KI), J.J. Kaparang. Sekretaris dipegang oleh H. Marasobu dari PNI sementara wakil sekterais dua orang, yakni: H. Mochtar (PSII), Hr. Marasobu (IP-KI). Bendahara dipegang oleh H.E. Nelwan dari PNI dan wakil bendaharan oleh H.Mursalin. Panitia ini memiliki anggota sebanyak 40 orang masing-masing anggota: Jan Mohamad Kaleb⁵⁵, Hi. Din Tombolotutu, P. Mahdang, Go. Lamataiya, Intje Rase, Mochsen Tandju, Dantje Talago, Paimin Ghandaly, Sudarmodjo, BA., Andi Wakka, M.A. Lapu, Salmin Alamri, Masthur Rahmatu, J.K. Jusuf, Usmin Lawado, Salim Basagevan, Seksi Penerangan: A. Rahim Alaydrus, Ismail Zain, Seksi Politik: Bujuni, A. Rahim, Abubakar Nggilu, M. Larekeng, Abdul Halim Kariming, Achmad B. Musa, Seksi Keuangan: Ahim Dg. Rachmatu, Mansur Dg. Riu, Seksi Perlengkapan: W.E. Mambu, I.D. Karandja, Nurdin Lahamudo, Ali Baha, Seksi Pemerintahan: Andi Ada Tagunu, **Nj. Norma Abubakar Nggilu**,⁵⁶ Seksi Penghubung: J. M. Caleb, R. Boraël, Seksi Pembangunan: S. Hadi Sasongko, SH., D. Dally, Sularno, Abd. Rachman Bahasyuan, Sidhi Suara, dan K. Hululo. Kalau kita perhatikan komposisi kepengurusan ini dari segi politik, posisi penting kepanitiaan dipegang oleh Partai Nasionalis Indonesia (PNI) karena memang pemenang politik nasional pada saat itu adalah PNI.

⁵⁵ Almarhum Dr.Kaleb pernah menjabat sebagai Bupati Donggala periode 1979-1984 dengan SK mendagri nomor Pem/7/42976, tanggal 30 Desember 1978.

⁵⁶ Seorang birokrat perempuan di Kecamatan Parigi.

Berdasarkan sumber yang telah dijelaskan tersebut, kelihatan bahwa perjuangan awal untuk menuntut Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan langkah-langkah politik pada zaman itu. Kalau kita merujuk representatif hasil Pemilu 1955 perolehan suara Kabupaten Donggala dimenangkan oleh Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dengan perolehan suara sebanyak 61.582 suara dari 146.549 pemilih tetap di Kabupaten Donggala pada saat itu, kemudian menyusul Masyumi 49.000 suara, Parkindo 9.301 suara, PNI 8.689 suara, dan NU. 1.610 suara.⁵⁷ Keadaan inilah yang tercermin dalam dinamika politik di akhir Orde Lama dan awal Orde Baru dalam DPRD-GR 1965 Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh 7 orang dari PSII termasuk Ahim Dg. Rahmatu dan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah 1970 diwakili oleh 9 orang dari PSII termasuk Ahim Dg. Rahmatu yang berasal dari Pantai Timur. Gerakan PSII dalam pembentukan Kabupaten Parigi Moutong bukan hanya dilakukan dalam lingkup Sulawesi Tengah, namun juga melalui dinamika PSII di Pusat dengan Ishak Moro anggota DPR-GR Pusat yang kebetulan berasal dari Sulawesi Tengah hingga pembuatan inisiatif rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

⁵⁷ Alfian, Hasil pemilu tahun 1955 untuk DPR (Jakarta: Leknas, 1971), hal. 152-154.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

Kerajaan Banggai sebagai identitas menjadi pusat kesadaran untuk legitimasi Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Banggai terutama Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut. Pemekaran Kabupaten Banggai Laut dimekarkan dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 2013 adalah dampak pemindahan ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 yang dianggap oleh Orang Banggai Laut sebagai pasal siluman. Pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan adalah wujud dari perjuangan untuk mengembalikan identitas asli kebanggaan yang dipindahkan dari Banggai Laut ke Luwuk sejak zaman pendudukan Jepang oleh H.S.A. Amir di tahun 1942 dengan alasan akses darat lebih bagus dibandingkan dengan akses laut, padahal Kerajaan Banggai merupakan kerajaan maritime yang diperhitungkan di masa lalu. Kerajaan sebagai pusat kesadaran dan legitimasi masih menjadi acuan, namun pemekaran Banggai Kepulauan sadar atau tidak mengikuti pembagian spasial Kolonial Belanda sejak tahun 1919 yang membagi Banggai menjadi Banggai Darat dan Banggai Laut sebagai salah satu wilayah dari Keresidenan Manado yang sebelumnya menjadi bagian wilayah *Afdeling Oost Celebes* dengan ibukota di Bau-Bau di Pulau Buton. Sewaktu Pendudukan Jepang mengangkat H.S.A. Amir diangkat menjadi Suco, dan merasa ada legitimasi dari Jepang yang sebelumnya juga mendapat legitimasi Belanda, maka beliau memindahkan Ibukota Banggai dari Banggai Laut ke Luwuk, hal ini menjadi awal pemnghianatan identitas kerajaan Banggai dalam dinamika sosio-politik di daerah ini.

Proses sosio-politik subnasional di Wilayah Banggai dengan memilih identitas Kerajaan Banggai terasa akan memberikan implikasi pada kebaikan bersama untuk kepentingan masyarakat. Pemekaran tiga Banggai (Kabupaten banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut) dari Kabupaten Poso akan terjadi pembagian kekuasaan secara maksimal, namun tokoh-tokoh politik lokal yang mendapatkan legitimasi Kerajaan Banggai justru menjadikan Banggai sebagai pusat perubahan yang nantinya akan

mengecewakan beberapa pihak sehingga luka sejarah dungkap kembali. Hal itu terjadi ketika pengajuan legal standing dari Dewan Adat Banggai ke Mahkamah Konstitusi mengenai pemindahan kembali ibu Kota Banggai Kepulauan ke Banggai pusat Kerajaan lama Kerajaan Banggai namun dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena ada penarikan berkas dari Ketua Dewan Adat yang dilakukan oleh Hideo Amir, anak raja H.S.A. Amir sehingga mendapatkan protes dari pihak Banggai yang dimotori oleh Iskandar Zaman seorang keturunan Raja Banggai Awaludin raja Banggai ke-20 yang selalu dikatakan berhak atas Kerajaan Banggai. Kelompok Iskandar Zaman atas nama Kerajaan Banggai berusaha mau mengembalikan kejayaan Kerajaan Banggai menjadi Kabupaten Banggai Laut, namun sebelum menyaksikan pemekaran di tahun 2013, Iskandar Zaman meninggal dunia karena penyakit tetapi sebelumnya telah dilantik menjadi Tomundo dan bergabung ke Forum Keraton Nusantara, bahkan bertindak sebagai Koordinator Forum untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya yang masih kecil dengan pelaksana adiknya Irwan Zaman, namun kelompok Irwan Zaman tidak dapat berbuat banyak sehingga posisi ke-Tomundo-an (Raja Banggai) masih dikendalikan dari Luwuk oleh Hideo Amir yang tetap menganggap bahwa tiga Banggai masih dibawah kendali beliau.

Berdasarkan pembahasan dalam hasil penelitian ini dan mengacu pada persoalan yang ditampilkan beberapa kesimpulan penting untuk kabupaten Parigi Moutong antara lain: **Pertama**, Penggerak awal perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong dari Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dimulai sejak rapat pertama untuk perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong pada tahun 1963 oleh tokoh-tokoh politik penting seperti: Andi Pelawa Tagunu, Ahim Dg. Rahmatu, Arsid Pasau dan lain-lain. **Kedua**, Proses perjuangan pemekaran Kabupaten Parigi Moutong sejak tahun 1960 hingga tahun 1969 dalam tiga tahap penting, yakni: Pada tanggal 8 Juni 1963 yang menuntut Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana dalam Resolusi DPRD-GR dan menghadap Asisten Menteri Dalam Negeri Urusan Kepulauan Sulawesi dan Maluku di Palu pada tanggal 25 Juli 1963 dan pada tanggal 12 Agustus 1963 Panitia Penuntut Kabupaten Parigi-Moutong di Lapangan Toraranga Parigi. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juni 1966 ke Jakarta oleh

tokoh-tokoh D. Daly, Abd. Halim Kariming, A. Pasau, Dantje Borman, Rusdi Toana, dan Ahim Dg. Rahmatu.⁵⁸ Pada tanggal 18 September 1967 ke Jakarta lagi oleh Arsid Pasau, Abd. Halim Kariming, D. Daly, Saleh Barung. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 1969 oleh Andi Pelawa Tagunu, Ahim Dg. Rahmatu, Arsid Pasau, A. Nento, M.P. Latjado, J.J. Kaparang, H. Marasobu, H. Mochtar, Hr. Marasobu, H.E. Nelwan, H.Mursalin, Jan Mohamad Kaleb, Hi. Din Tombolotutu, P. Mahdang, Go. Lamataiya, Intje Rase, Mochsen Tandju, Dantje Talago, Paimin Ghandaly, Sudarmodjo, BA., Andi Wakka, M.A. Lapu, Salmin Alamri, Masthur Rahmatu, J.K. Jusuf, Usmin Lawado, Salim Basagevan, Seksi Penerangan: A. Rahim Alaydrus, Ismail Zain, Seksi Politik: Bujuni, A. Rahim, Abubakar Nggilu, M. Larekeng, Abdul Halim Kariming, Achmad B. Musa, Seksi Keuangan: Ahim Dg. Rachmatu, Mansur Dg. Riu, Seksi Perlengkapan: W.E. Mambu, I.D. Karandja, Nurdin Lahamudo, Ali Baha, Seksi Pemerintahan: Andi Ada Tagunu, Nj. Norma Abubakar Nggilu, Seksi Penghubung: J. M. Caleb, R. Boraël, Seksi Pembangunan: S. Hadi Sasongko, SH., D. Dally, Sularno, Abd. Rachman Bahasyuan, Sidhi Suara, dan K. Hululo. **Ketiga**, Kuatnya politik nasional sehingga melumpuhkan kekuatan politik lokal pada tahun 1960-an. Perjuangan politisi dan masyarakat Parigi Moutong tidak berhasil memekarkan Kabupaten Parigi Moutong karena kuatnya pengaruh PSII di tingkat Provinsi, Kabupaten dan lokal Parigi Moutong disbanding dengan kekuatan PNI secara nasional sehingga gerakan Pemekaran Kabupaten Parigi Moutong tidak berhasil dengan baik.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat direkomendasikan beberapa hal sebagai saran-saran hasil penelitian ini yakni: Pertama, Penelitian secara mendalam tentang

⁵⁸ Tokoh Ahim Dg. Rahmatu adalah seorang politisi PSII yang menjadi anggota DPRD-GR Provinsi Sulawesi Tengah 1965 dan 1970, baca: Malaga, Memori Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Depan Sidang DPRD-GR Prov. Sulawesi Tengah 6 Oktober 1971, hal.75 dan 77.

potensi sebagai dasar pemekaran masih perlu pendalaman atau penelitian lanjutan. Kedua, Konflik dalam pemekaran Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Parigi Moutong adalah lanjutan konflik komunal di awal pembentukan Kabupaten induk sehingga perlu kebijakan yang memadai untuk kajian lebih lanjut supaya di masa depan tidak terjadi lagi konflik structural. Ketiga, Hasil penelitian ini perlu diterbitkan dalam sebuah buku.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Hasil pemilu tahun 1955 untuk DPR, Jakarta: Leknas, 1971.
- Andi Mas Ulun, Sejarah Singkat Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Donggala: satu sanggahan, Palu: Yayasan Pudjananti Indonesia, 1992.
- Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Muzakkar: dari Patriot hingga Pemberontak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992.
- Anton Blok, *Wittgenstein en Elias: Een Methodische Richtlijn voor de Antropologie*, Athenaeum: Polak & Van Gennep. 1976.
- Barbara Sillars Harvey, *Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII*, Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
- Benedict R.O'G. Anderson, *KUASA-KATA Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 1990.
- Brian Mc Nair. 2003. An Introduction To Political Communication. London and New York: Routledge, dalam: Nurlaina, Motif Aktor Lokal Dalam Kuota Pencalonan 120 Persen Partai Politik Lokal Pada Pemilu 2019 Di Provinsi Aceh, <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/31824/187054017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Dr. Hedy shri Ahimsa Putra dalam makalahnya yang berjudul: "Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Adakah Hubungannya, disampaikan pada Dies Natalis ke-55 Fakultas sastra UGM tanggal 24 Maret 2001.
- Haliadi dan Ismail, Sejarah Sosial Sulawesi Tengah, Palu: Hoga, 2019.
- Haliadi, dkk., Sejarah Kabupaten Parigi Moutong, Yogyakarta, Ombak, 2012.
- Haliadi, Masyarakat Baru Dengan Kearifan Lama," Tafsir Sosiobudaya atas UU no.51 pasal 11 pemindahan Ibukota Bangkep dari Banggai ke Salakan disampaikan pada Mahkamah Konstitusi.
- Haliadi, Reformasi di Tingkat Lokal Sulawesi Tengah (Kasus Banggai dan Parigi Moutong), Kertas Kerja yang belum diterbitkan, 2016.
- Haliadi, Sejarah Lokal Banggai: Sebuah Ide Penguatan Metodologi, Disampaikan

pada Seminar Lokal Banggai oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Hotel Don Mery Banggai Kepulauan tanggal 1 Desember 2007.

Halim Kariming, Catatan Memori Penuntutan Pembentukan Kabupaten, makalah disampaikan di Hotel Oktaria Parigi.

Hasdin Mondiga, Banggai Darussalam: Fajar Baru di Laut Banda, Jakarta: LP2M, 2007.

Henk Schulte Noordholt, Kriminalitas, Modernitas, dan Identitas dalam Sejarah Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Henry Muddick, 1966, *Democracy, Decentralization and Development, Reprinted London, Asia Publishing House*, hlm 23. Diterjemahkan bebas dengan judul, *Desentralisasi dalam Praktek*, Cetakan I, Pustaka Kendi, Yogyakarta, 2004.

Irwan Zaman (Iwan), Kesaksian Atas Nama “Menjalankan” Undang-Undang Terjadi kekacauan dan Disharmonisasi Dalam Kehidupan Sesama Warga Masyarakat/Komunitas Masyarakat Adat Banggai, tidak diterbitkan.

Jar'an Abd. Fatah, Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asal Mula Danau Tendetung; Cerita Rakyat Desa Kanali, tanpa tempat, penerbit, dan tahun terbit; Banggai Kepulauan Dalam Cerita, Yogyakarta: Rosyada Media, 2000.

JJ. Dormier, Hukum Adat banggai VI, Tanpa tempat dan penerbit, 1945.

Juraid dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah, Laporan Penelitian Bapeda Prop. Sulteng 1991.

Karim, Abdul Gaffar (ed), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Binacipta, Bandung. Dikutip oleh M. Laica Marzuki dalam ***Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, “Politik lokal di Indonesia: dari otokratik ke reformasi politik,” *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010, hal. 5-30.
- M. Laica Marzuki, **2006, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum***, Buku Kesatu, Edisi Revisi Cetakan Kedua, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- M.C. Ricklefst, *A History of Modern Indonesia, since c.1300, second edition*, Basingstoke and London: The Macmillan Press, Ltd., 1993.
- Machmud HK., *Babad Banggai Sepintas Kilat*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 1986.
- Malaga, *Memori Gubernur Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Depan Sidang DPRD-GR Prov. Sulawesi Tengah 6 Oktober 1971*.
- Masri Singarimbun dkk, *Sensus Penduduk 1961 Penduduk Desa Sulawesi dan Maluku*, Yogyakarta: PPSK UGM dan BPS, 1980.
- Volkstelling 1920 dan Volkstelling 1930.
- Masyhuddin Masyhuda, *Etnik dan Logat di Sulawesi Tengah* (Palu: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Tengah, 1991).
- Neneng Sobibatu Rohmah yang berjudul :”Elit Dan Pemekaran Daerah; Konflik Antar Elit Dalam Proses Pembentukan Provinsi Banten,” *Jurnal CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol.4, No.1, April 2018.
- Pahlawan Rambe, *Sejarah Pendidikan di Banggai Kepulauan (1942-1999)*, Skripsi S1 FKIP UNTAD 2003.
- R.Z. Leirissa, *PRRI Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991/1997.
- Reinhard Nainggolan, “Demokrasi pada Kearifan Lokal,” *Kompas*, Senin 7 Mei 2007.
- Resolusi DPRD-GR, nomor: 1/DPRD-GR/1966, tanggal 16 Pebruari 1966 ditetapkan di Poso ditandatangani oleh Z. Abd. Rauf, diketahui oleh Gubernur Anwar Gelar datuk Majo Basah Nan Kuning.
- Resolusi Nomor 1/DPRDGR/1966,

Ria Mardin, “Misteri Hilangnya Sang Pahlawan di Tanjung Pemali, “ dalam: Banggai Kepulauan Dalam Cerita (Yogyakarta: Rosyada Media, 2000).

Rusdi Toana dan Abd. Karim Mbouw, Mengungkap Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah di Arena Sejarah Bangsa Indonesia, ang diselenggarakan oleh Panitia Sarasehan Sejarah dan Pembangunan Sulteng Fakultas Sospol UNTAD (Cabang UNHAS) di Palu pada bulan April 1980, hal. 28.

SK mendagri nomor Pem/7/42976, tanggal 30 Desember 1978.

Syaukani, HR dkk,2004, **Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan**, Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta.

Ted Robert Guur, Why Men Rebel (Princeton University Press, 1970; revised edition Paradigm Publishers, 2010)

The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia Jilid II (Yogyakarta: Liberty, 1994), hal.206.

Tim Tekhnis dan Presidium Forum Silaturahmi Warga Parigi-Moutong, Pernyataan dan Studi Kelayakan Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Dalam Rangka Pemekaran Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah, 2000, hal.6.

Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45394/uu-no-51-tahun-1999#:~:text=UU%20No.%2051%20Tahun%201999,Banggai%20Kepulauan%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>, dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2002, dalam: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44437/uu-no-10-tahun-2002#:~:text=UU%20No.%2010%20Tahun%202002,Sulawesi%20Tengah%20%5BJDIH%20BPK%20RI%5D>

Wawancara dengan H. Ahmad Sombali, hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017 di Bonggan Salakan Kabupaten banggai Kepulauan.

Wawancara Hideo Amir, Hari Minggu, tanggal 23 Juli 2017, di Luwuk Kabupaten Banggai.

Wawancara Syarif Uda’a, Hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di Banggai Kabupaten Banggai Laut.

Wilman Darsono, Mengais Rejeki di Ayunan Ombak, Skripsi S1 FKIP Untad 2006.